

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2025

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I JAKARTA

KATA PENGANTAR



**Renny
Kusumaningtyas**

Plt. Kepala Balai Monitor SFR
Kelas I Jakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun Anggaran 2025 dapat rampung sebagaimana mestinya. Dokumen ini merupakan manifestasi tanggung jawab kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi sepanjang periode 2025. Di dalamnya, tertuang capaian riil dari program yang telah dicanangkan, disertai analisis mendalam mengenai efektivitas serta efisiensi kinerja kami. Proses penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan sistematis melalui sinergi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI serta koordinasi erat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sebagai instansi yang menjunjung tinggi pilar akuntabilitas, kami berkomitmen untuk terus transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami berharap laporan ini dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi seluruh jajaran pegawai Balmon SFR Kelas I Jakarta untuk senantiasa meningkatkan performa demi mencapai target-target strategis di masa mendatang.

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap pegawai Balmon SFR Kelas I Jakarta untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plt. Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta

Renny Kusumaningtyas

DAFTAR ISI

- ii KATA PENGANTAR**
- iii DAFTAR ISI**
- 4 RINGKASAN EKSEKUTIF**

BAB I PENDAHULUAN

- 9 LATAR BELAKANG**
- 11 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- 13 POTENSI DAN PERMASALAH STRATEGIS**
- 14 SISTEMATIKA LAPORAN**

BAB II PERJANJIAN KINERJA

- 16 RENCANA STRATEGIS 2025-2026**
- 16 SASARAN PROGRAM**
- 17 PERJANJIAN KINERJA**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi, khususnya penggunaan frekuensi radio di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Peran utama Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas serta memberikan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat.



Sebagai pengawas dan pengendali penggunaan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, mempunyai tugas antara lain melakukan monitoring dan mengukur parameter teknis, mendeteksi sumber pancaran frekuensi radio, serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Hal ini sebagai pembinaan pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib, efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu.

Penilaian pada kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang dapat dilihat dari pencapaian sejumlah indikator kinerja yang menjadi target pencapaian kinerja di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Kinerja (1) Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi.

Dari 13 indikator kinerja pada sasaran kinerja diatas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mencapai dan bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan dilihat dari data sebagai berikut :

➔	IKSK 1.1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota		
	Target	Capaian	
	100%	125%	⬆
➔	IKSK 1.2 Pemeriksaan Stasiun Radio		
	Target	Capaian	
	100%	100%	⬆
➔	IKSK 1.3 Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (Peningkatan Aksi)		
	Target	Capaian	
	100%	105,26%	⬆
➔	IKSK 1.4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digita		
	Target	Capaian	
	100%	133,33%	⬆
➔	IKSK 1.5 Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta		
	Target	Capaian	
	100%	107,94%	⬆



IKSK 1.6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Target

100%

Capaian

124.18%



IKSK 1.7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Target

100%

Capaian

100%



IKSK 1.8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR,MOTS-IKRAN)

Target

100%

Capaian

100%



IKSK 1.9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Target

100%

Capaian

100%



IKSK 1.10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Target

100%

Capaian

100%



IKSK 1.11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Target

100%

Capaian

123.12%



IKSK 1.12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Target

100%

Capaian

110%



IKSK 1.13 Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Target

100%

Capaian

100%



Sasaran Kinerja (2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien.

Dari 2 indikator kinerja pada sasaran kinerja diatas, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mencapai dan bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan dilihat dari data sebagai berikut :

➔	IKSK 2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025	
	Target 86.95%	Capaian 84.37%
➔	IKSK 2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA	
	Target 100%	Capaian 100% ↑

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio (SFR) merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi. Sebagai gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa mengenal batas wilayah (borderless), penggunaan SFR untuk berbagai keperluan mulai dari siaran radio, komunikasi seluler, hingga layanan keselamatan jiwa wajib memiliki izin resmi. Pengaturan ini krusial guna memastikan penggunaan spektrum yang tertib, efisien, serta bebas dari gangguan (interferensi) yang dapat merugikan kepentingan publik maupun negara.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memegang mandat konstitusional dan peran strategis yang sangat fundamental sebagai motor penggerak transformasi digital nasional yang bertanggung jawab penuh dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan serta perlindungan sumber daya spektrum frekuensi radio sebagai aset strategis negara yang bersifat terbatas dan merambat melintasi batas-batas wilayah kedaulatan, di mana dalam menjalankan fungsinya, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mengintegrasikan kekuatan manajerial dan teknis melalui sinergi Direktorat Penataan Sumber Daya dalam perencanaan alokasi yang presisi, Direktorat Operasi Sumber Daya dalam tata kelola perizinan yang akuntabel, serta Direktorat Pengendalian yang bertugas memastikan kepatuhan hukum di lapangan, sehingga tercipta ekosistem pemanfaatan frekuensi radio bagi jasa telekomunikasi yang tertib, efisien, dan bebas dari potensi gangguan interferensi yang dapat mengancam stabilitas komunikasi nasional maupun keselamatan jiwa manusia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh upaya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan bentuk implementasi nyata dari pendelegasian wewenang negara sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**, yang kemudian telah diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman melalui **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang memberikan payung hukum bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam menata penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai infrastruktur digital dasar bagi kemajuan ekonomi dan sosial bangsa.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memegang peran vital dan strategis sebagai garda terdepan sekaligus unit pelaksana teknis di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya, yang memiliki tanggung jawab krusial dalam melakukan pengawasan, pemantauan, serta pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara real-time di tengah densitas perangkat telekomunikasi tertinggi di Indonesia, guna memastikan tidak adanya penggunaan frekuensi ilegal yang dapat mengganggu komunikasi penerbangan, sistem navigasi objek vital negara, serta layanan pita lebar seluler, di mana melalui pengoperasian infrastruktur monitoring yang canggih dan pelaksanaan inspeksi lapangan yang berkelanjutan, Balmon Jakarta berperan sebagai penegak ketertiban ruang udara elektromagnetik demi menjamin kedaulatan digital dan kelancaran arus informasi di pusat ekonomi serta pemerintahan nasional.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil. Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI



Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

STRUKTUR ORGANISASI

Sejalan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pemerintah Indonesia telah menetapkan langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024, yang secara resmi menetapkan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi); sebuah transformasi fundamental yang tidak hanya bersifat administratif pada level nomenklatur, namun juga merepresentasikan pergeseran paradigma serta perluasan ruang lingkup tugas dan fungsi kementerian dalam merespons tantangan global di sektor digital.

Transformasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan struktur organisasi negara dengan kebutuhan ekosistem digital yang kian kompleks, di mana peran Kementerian Komdigi kini semakin difokuskan pada penguatan infrastruktur digital, kedaulatan data, serta optimalisasi sumber daya spektrum frekuensi radio sebagai fondasi utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Perubahan ini menjadi landasan baru bagi seluruh unit kerja di bawahnya, termasuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, untuk senantiasa adaptif dan inovatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati konektivitas digital yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di masa depan.

Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta terdiri dari :



1. Kepala Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS



Dalam upaya mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas dari interferensi yang merugikan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta perlu mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang profesional serta adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi telekomunikasi. Namun demikian, pengelolaan spektrum frekuensi radio saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis, hal ini berdasarkan dari hasil monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, antara lain

1. Masih tingginya penggunaan frekuensi secara ilegal yang berpotensi mengganggu keselamatan maritim dan penerbangan;
2. Maraknya pemanfaatan spektrum frekuensi tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) atau tidak sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
3. Munculnya gangguan pada layanan operator seluler akibat penggunaan repeater ilegal dan jammer yang tidak sah;
4. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban kepemilikan ISR dalam setiap penggunaan spektrum frekuensi radio.

SISTEMATIKA PELAPORAN



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pentunjuk Teknis Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Digital meliputi:

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2024.
3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
4. Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025–2029

Rencana Strategis Komdigi 2025–2029 dirancang sebagai peta jalan komprehensif untuk mentransformasi Indonesia menjadi kekuatan digital global dengan mengusung visi besar "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga". Dalam pelaksanaannya, kementerian fokus memperluas jangkauan konektivitas hingga ke pelosok negeri agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam mengakses informasi dan peluang ekonomi digital. Selain memperkuat infrastruktur fisik, rencana ini juga memberikan penekanan besar pada pertumbuhan ekosistem melalui penciptaan jutaan talenta digital terampil dan dukungan penuh terhadap inovasi teknologi lokal agar ekonomi nasional dapat melompat lebih tinggi.

Di sisi lain, aspek keamanan menjadi pondasi utama yang tidak bisa ditawar, di mana Komdigi berkomitmen penuh untuk menjaga kedaulatan data bangsa serta memastikan ruang digital tetap bersih dari ancaman siber maupun konten negatif yang merusak tatanan sosial. Secara keseluruhan, strategi ini memposisikan pemerintah bukan sekadar sebagai regulator, melainkan sebagai orkestrator yang menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terciptanya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi secara digital.

SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya Program, Sasaran Kinerja, dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Infrastruktur Digital (Infradigi). sebagai berikut :

1. Program Utama Ditjen Infrastruktur Digital

Ditjen Infrastruktur Digital (Infradigi) Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki fokus program pada pembangunan, pemerataan, serta optimalisasi infrastruktur digital di Indonesia, khususnya dalam hal:

1. Pemerataan Akses Digital 3T: Fokus pada perluasan akses internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), termasuk percepatan pembangunan di wilayah Papua.
2. Program Kampung Internet 2025: Peluncuran inisiatif untuk memastikan konektivitas digital menjangkau tingkat pedesaan guna menutup kesenjangan digital.
3. Keberlanjutan Infrastruktur Strategis: Pengoperasian penuh dan migrasi layanan ke Satelit SATRIA-1, serta penuntasan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
4. Roadmap Mobile Broadband Nasional: Penyusunan peta jalan untuk menuntaskan pemerataan internet pita lebar di seluruh Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja dibuat untuk menilai kinerja UPT dan mengevaluasi pencapaian target. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berperan dalam mencapai indikator kinerja Ditjen ilnfradig tahun 2025, yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi	Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio	80%
		Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio	100%
		Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio	95%
		Persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital	75%
		Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%
		Persentase (%) penanganan sanksi denda administratif	80%
		Persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan	100%
		Persentase (%) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%
		Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio	100%
		Persentase (%) sosialisasi pelayanan publik	100%
		Persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP)	

No	Sasaran	Indikator	Target
2	Meningkatnya kualitas tata kelola ditjen Infrastruktur Digital yang efektif dan efisien	Persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IIP/IPAK)	100%
		Persentase (%) tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
		Nilai kinerja anggaran Balai/Loka Tahun 2025	86.95%
		Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 akan memfokuskan diri pada mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini bertujuan untuk mencapai sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital melalui Unit Pelaksana Teknis.

Secara keseluruhan, berikut adalah capaian kinerja dari rencana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balmon SFR Kelas I Tangerang, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital untuk tahun 2025:

SASARAN KINERJA I

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi.

IK-1.1 Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio

Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di wilayah kerja **Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta**, densitas penggunaan frekuensi radio di wilayah metropolitan kini mencapai titik tertinggi di Indonesia. Kondisi ini membawa tantangan teknis yang kompleks, terutama terkait risiko interferensi sinyal yang dapat mengganggu layanan publik esensial. Guna menjamin kepatuhan pengguna terhadap regulasi serta menjaga kualitas layanan digital, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif, akurat, dan responsif.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah **Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia**, Balmon SFR Kelas I Jakarta memegang mandat krusial dalam memastikan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) serta Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) berjalan tertib hukum. Fokus utama Balmon SFR Kelas I Jakarta adalah memastikan bahwa setiap penggunaan frekuensi memiliki izin yang sah (ISR) dan beroperasi sesuai dengan parameter teknis yang telah ditetapkan guna melindungi ekosistem digital nasional.

Yurisdiksi kerja Balmon SFR Kelas I Jakarta mencakup 11 wilayah administratif strategis yang meliputi seluruh Provinsi DKI Jakarta serta wilayah penyangga BODEBEK (Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota/Kabupaten Bekasi). Berdasarkan data Spectrum Management Information System (SIMS) per Januari 2025, profil beban kerja monitoring kami adalah sebagai berikut:



Pelaksanaan tugas monitoring tahun 2025 didasarkan pada **Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025** tanggal 3 Maret 2025 terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital. Arahkan strategis tersebut menekankan bahwa capaian kinerja tahun 2025 harus berorientasi pada optimalisasi infrastruktur digital melalui pengawasan spektrum yang akuntabel.

Sebagai langkah konkret, Balmon SFR Kelas I Jakarta diinstruksikan untuk melaksanakan pemantauan intensif terhadap **15 pita frekuensi radio prioritas**, yang mencakup:

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

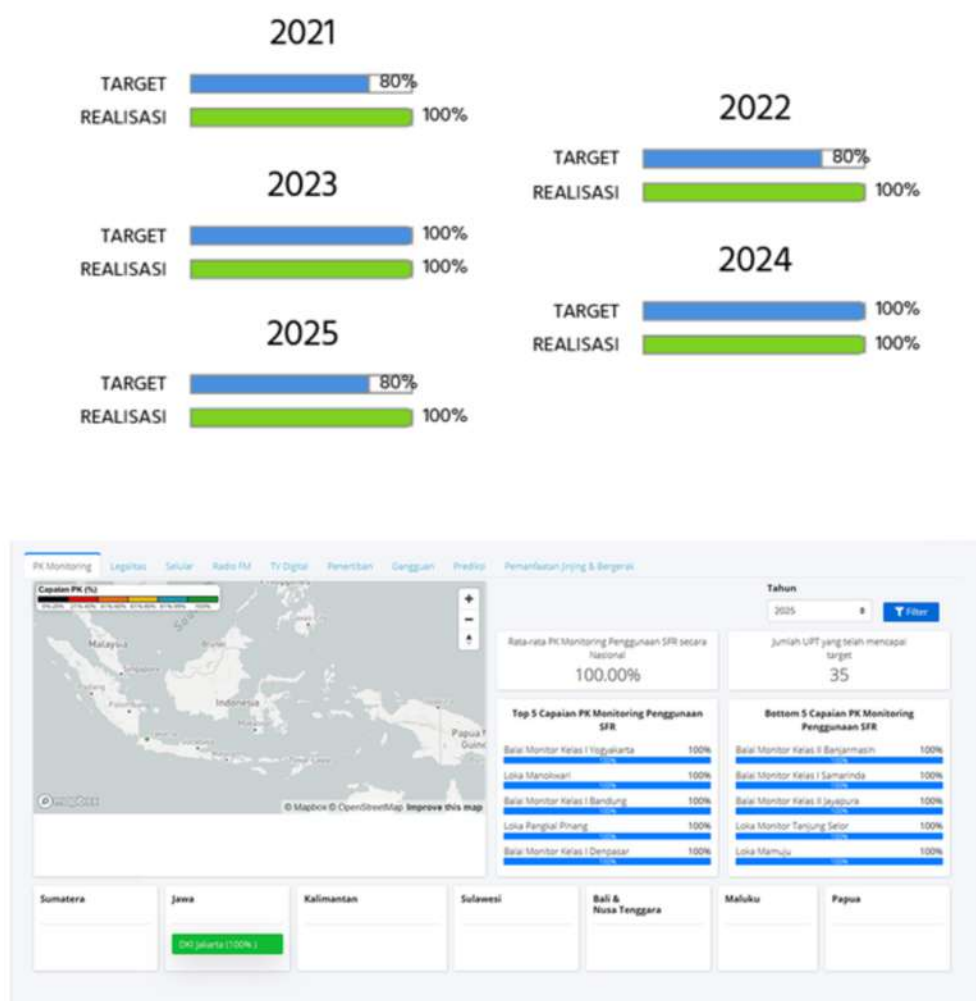
Sebagai pilar utama dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, Balmon SFR Kelas I Jakarta melaksanakan kegiatan Monitoring Pendudukan Pita Frekuensi Radio (Okupansi). Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan tingkat penggunaan spektrum secara riil di lapangan pada pita frekuensi tertentu di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan monitoring ini didukung oleh infrastruktur yang komprehensif, mulai dari perangkat monitor jinjing (portable) dan stasiun bergerak (mobile station), hingga stasiun tetap (fixed) maupun transportable.

Secara teknis, proses perekaman data kanal, level sinyal, dan durasi pendudukan dilakukan dengan standar durasi pengamatan yang ketat guna menjamin akurasi data, yakni:

- **Subservice 1 s.d. 9:** Pengamatan dilakukan sekurang-kurangnya selama **4 (empat) jam**.
- **Subservice 10 s.d. 15:** Pengamatan dilakukan sekurang-kurangnya selama **30 (tiga puluh) menit**.

Melalui metodologi yang terstandarisasi ini, Balmon Kelas I Jakarta memastikan bahwa setiap data okupansi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen spektrum yang lebih efisien.

Capaian kinerja



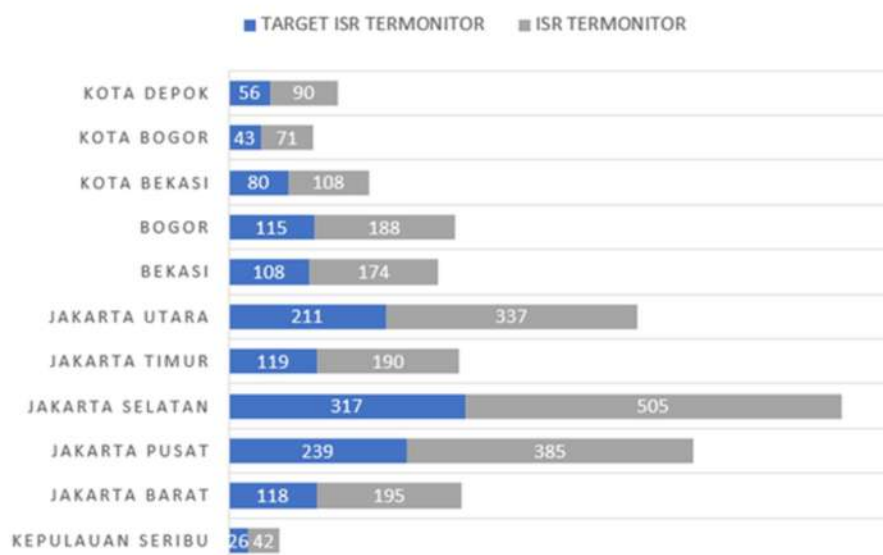
Balmon SFR Kelas I Jakarta mampu merealisasikan capaian pada seluruh komponen yang menjadi indikator dalam perhitungan kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh kabupaten/kota wilayah kerjanya pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta pada tahun 2025 berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 80%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa seluruh kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Jakarta telah terlaksana secara efektif dan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

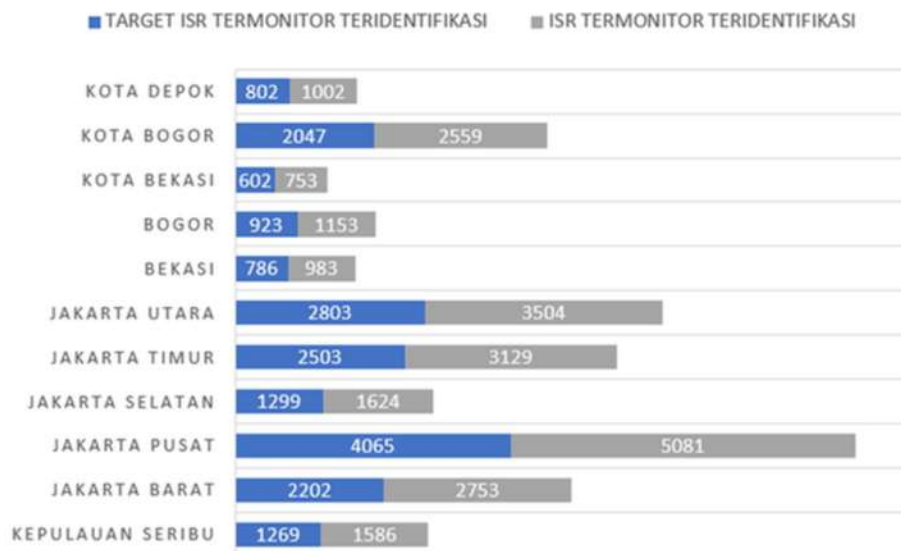
Adapun rincian capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota :

- Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) dilaksanakan pada 11 Kab/Kota di wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Jakarta. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, sebanyak 15 pita frekuensi radio telah berhasil dimonitor tingkat pendudukannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan spektrum frekuensi radio serta mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih optimal, tertib, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Seluruh 11 Kab/Kota di wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Jakarta telah dilaksanakan kegiatan monitoring, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kepulauan Seribu.
- Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, jumlah Izin Stasiun Radio (ISR) yang berhasil dimonitor sebanyak 2.285 ISR, melampaui target monitoring yang ditetapkan yaitu 1.432 ISR. Pencapaian tersebut digambarkan pada grafik berikut :



- Jumlah Izin Stasiun Radio (ISR) termonitor yang teridentifikasi sebanyak 24.127 ISR, melampaui target minimal yang ditetapkan yaitu 19.301 ISR. Pencapaian tersebut digambarkan pada grafik berikut :



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta:

- Wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Jakarta mencakup 11 kabupaten/kota dengan tingkat aktivitas penggunaan spektrum frekuensi radio yang tinggi, sehingga memerlukan waktu, perencanaan, dan sumber daya yang cukup untuk menjangkau seluruh lokasi monitoring secara optimal.
- Wilayah metropolitan Jakarta dan sekitarnya memiliki tingkat penggunaan frekuensi radio yang sangat tinggi dari berbagai sektor, seperti telekomunikasi, penyiaran, transportasi, dan layanan komunikasi lainnya, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam proses pemantauan dan analisis spektrum.
- Pelaksanaan monitoring lapangan seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan waktu kegiatan serta kondisi operasional di lapangan, sehingga diperlukan pengaturan jadwal monitoring yang efektif agar seluruh target dapat tercapai.
- Karakteristik wilayah perkotaan yang padat dengan bangunan tinggi serta infrastruktur telekomunikasi yang beragam dapat mempengaruhi hasil pengukuran spektrum frekuensi radio dan memerlukan metode monitoring yang lebih teliti.
- Beberapa peralatan monitoring stasiun tetap yang dimiliki oleh Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta mengalami kerusakan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio. Sebagai upaya penanganan, telah dilakukan perbaikan terhadap peralatan yang rusak serta optimalisasi penggunaan peralatan monitoring portable untuk mendukung kelangsungan kegiatan monitoring di lapangan.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta:

- Melakukan pemanfaatan secara maksimal terhadap peralatan monitoring yang masih berfungsi serta mengoptimalkan penggunaan perangkat monitoring portable untuk mendukung kegiatan monitoring di lapangan.
- Melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan monitoring, khususnya pada stasiun tetap, guna memastikan peralatan dapat kembali beroperasi secara optimal.
- Menyusun jadwal dan prioritas lokasi monitoring secara lebih terstruktur berdasarkan tingkat kepadatan penggunaan frekuensi radio sehingga kegiatan monitoring dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
- Memanfaatkan data perizinan dan informasi spektrum frekuensi radio yang tersedia sebagai dasar dalam menentukan objek monitoring serta melakukan analisis penggunaan frekuensi secara lebih akurat.
- Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, serta pengguna spektrum frekuensi radio guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring di wilayah kerja.
- Mendorong peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan kapasitas agar mampu mengikuti perkembangan teknologi monitoring spektrum frekuensi radio.

Inovasi, Keberhasilan/Ketidakcapaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, kecepatan analisis, serta akurasi hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta terus melakukan pengembangan dan implementasi berbagai inovasi strategis. Inovasi tersebut dirancang untuk merespons tantangan operasional di wilayah ibu kota yang memiliki tingkat kepadatan pengguna spektrum tertinggi secara nasional, sekaligus memastikan kualitas layanan pengawasan yang optimal. Beberapa inovasi yang telah diimplementasikan antara lain:

- Balmon SFR Kelas I Jakarta mengimplementasikan sistem monitoring terintegrasi dengan ROL (Report On Line) yang memanfaatkan perangkat spektrum analyzer dengan kemampuan deteksi RTSA (real-time spectrum analyzer). Sistem ini dilengkapi dengan perangkat lunak analisis spektrum otomatis yang mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan sinyal secara cepat dan akurat. Dengan teknologi ini, proses identifikasi penggunaan frekuensi radio dan pelanggaran dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.
- Untuk menjangkau seluruh wilayah Kab/Kota secara efisien, Balmon SFR Kelas I Jakarta mengoperasikan mobil monitoring bergerak yang dilengkapi dengan peralatan monitoring spektrum frekuensi radio. Unit ini mampu melakukan pemantauan secara kontinu selama perjalanan dinas, merekam data spektrum secara otomatis, dan mengirimkannya ke pusat data secara real-time. Hal ini memungkinkan petugas untuk mengoptimalkan setiap perjalanan dinas dengan menggabungkan kegiatan monitoring di berbagai lokasi.

- Kecepatan dan akurasi analisis sangat bergantung pada kompetensi petugas PFR (Pengendali Frekuensi Radio). Balmon SFR Kelas I Jakarta secara berkala menyelenggarakan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi para PFR, mencakup penguasaan perangkat terkini, interpretasi data spektrum, serta teknik identifikasi spektrum frekuensi radio. Dengan SDM yang kompeten, hasil monitoring menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum.
- Balmon SFR Kelas I Jakarta menjalin kerja sama teknis dengan penyelenggara telekomunikasi, pengguna frekuensi, serta instansi terkait untuk berbagi data dan informasi spektrum. Kolaborasi ini memperkaya basis data dan mempercepat proses identifikasi sumber gangguan, karena petugas dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber secara terintegrasi.

Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota, Balmon SFR Kelas I Jakarta menerapkan beberapa langkah sebagai berikut:

- Penyusunan perencanaan dan jadwal monitoring yang terstruktur sehingga kegiatan monitoring dapat dilaksanakan secara sistematis dan tepat sasaran sesuai dengan prioritas wilayah dan objek monitoring.
- Pengelompokan lokasi monitoring berdasarkan wilayah terdekat guna meminimalkan waktu tempuh dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- Optimalisasi penggunaan peralatan monitoring, baik peralatan stasiun tetap maupun perangkat monitoring portable, untuk mendukung efektivitas kegiatan pemantauan di lapangan.
- Pemanfaatan data perizinan dan informasi spektrum frekuensi radio sebagai dasar dalam menentukan objek monitoring serta melakukan verifikasi penggunaan frekuensi secara lebih efisien.
- Pembagian tugas personel secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kegiatan monitoring sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Implementasi Nilai Budaya Berakhlak

• Berorientasi Pelayanan

Personel Balmon SFR Kelas I Jakarta melaksanakan kegiatan monitoring dengan mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik dan bebas dari gangguan.

• Akuntabel

Seluruh kegiatan monitoring dilaksanakan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung dengan pencatatan dan pelaporan hasil monitoring yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Kompeten**

Personel yang terlibat senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas di bidang monitoring dan analisis spektrum frekuensi radio, sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional dan mengikuti perkembangan teknologi.

- **Harmonis**

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, personel menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, instansi terkait, serta para pengguna spektrum frekuensi radio guna menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif.

- **Loyal**

Personel Balmon SFR Kelas I Jakarta melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio.

- **Adaptif**

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika penggunaan spektrum frekuensi radio, termasuk dalam pemanfaatan perangkat monitoring dan sistem informasi yang terus berkembang.

- **Kolaboratif**

Kegiatan monitoring juga dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, guna mendukung efektivitas pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Jakarta.

Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Termonitor	Capaian
Balmon SFR Kelas I Jakarta	11	11	100%
Balmon SFR Kelas I Bandung	22	22	100%

Berdasarkan hasil benchmark kinerja antar Unit Pelaksana Teknis, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dan Balai Monitor SFR Kelas I Bandung sama-sama berhasil mencapai tingkat capaian 100% dalam pelaksanaan pemantauan spektrum frekuensi radio di seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja masing-masing. Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta melaksanakan pemantauan di 11 Kab/Kota, sedangkan Balai Monitor SFR Kelas I Bandung mencakup wilayah yang lebih luas secara geografis, yaitu 22 Kab/Kota.

Meskipun secara persentase capaian kedua UPT menunjukkan angka yang sama, secara teknis Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta menghadapi tingkat kompleksitas dan tantangan operasional yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepadatan pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, yang secara langsung berdampak pada tingkat okupansi spektrum yang lebih padat dan beragam. Selain itu, kompleksitas lingkungan perkotaan yang dipenuhi dengan berbagai infrastruktur telekomunikasi, seperti Base Transceiver Station (BTS), stasiun televisi, dan perangkat komunikasi lainnya, menuntut petugas untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi sinyal secara lebih akurat. Proses verifikasi teknis di lapangan menjadi lebih menantang karena tingginya kemungkinan terjadinya tumpang tindih spektrum (co-channel) dan interferensi antar pengguna. Keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta mempertahankan capaian 100% di tengah tingginya dinamika penggunaan spektrum ini mencerminkan keandalan sistem monitoring, kompetensi teknis sumber daya manusia, serta efektivitas strategi pemantauan yang adaptif terhadap tantangan perkotaan.

Dengan demikian, capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta tidak hanya merefleksikan kuantitas wilayah yang dipantau, tetapi juga kualitas dan ketelitian teknis dalam memastikan seluruh spektrum frekuensi radio di wilayah padat pengguna dapat terpantau secara optimal, akurat, dan bebas dari gangguan.

Dokumentasi Kegiatan





IK-1.2 Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio

Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat tata kelola spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya strategis nasional, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan pengguna frekuensi radio terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Spektrum frekuensi radio merupakan infrastruktur vital dalam mendukung transformasi digital, konektivitas nasional, serta percepatan pembangunan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya wajib memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang sah dari Pemerintah guna menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan spektrum. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta secara rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan inspeksi dalam rangka validasi data Izin Stasiun Radio (ISR), khususnya bagi pengguna Microwave Link, sesuai target yang ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data ISR dalam database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga tercipta basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain meningkatkan validitas dan akurasi data, kegiatan ini juga berperan dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, dengan meminimalkan potensi penggunaan frekuensi tanpa ISR. Dengan demikian, pengawasan dan validasi ini tidak hanya mendukung tertib spektrum dan efisiensi pengelolaan sumber daya frekuensi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan kapasitas fiskal negara serta percepatan pembangunan infrastruktur digital yang andal, merata, dan berdaya saing di tingkat global.

Sesuai dengan Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital untuk Kegiatan pemeriksaan stasiun radio terdiri dari :

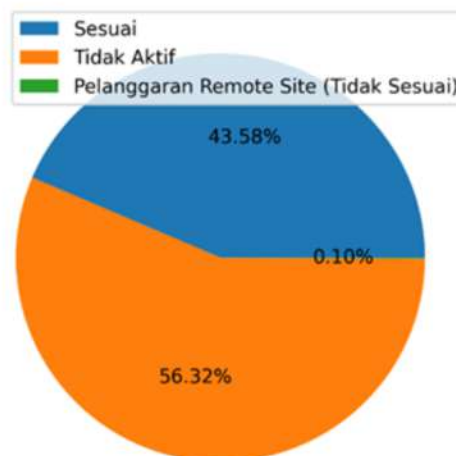
- Pemeriksaan Microwave link melalui Remote Site dilakukan sekurang-kurangnya 80% dari data target yang diberikan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD)
- Pemeriksaan Microwave link melalui Open Shelter dilakukan sekurang-kurangnya 60% dari data target yang diberikan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD)

- Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM, untuk UPT dengan jumlah ISR siaran Radio FM (> 50) ISR dapat melakukan pengukuran parameter teknis sekurang – kurangnya 50 ISR siaran Radio FM
- Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio TV Digital, Seluruh stasiun siaran TV Digital

Capaian kinerja

No	Komponen kegiatan	Target	Telah Diperiksa
1	Pemeriksaan Microwave link Open Shelter	60% x data target (1004) = 603	1004 ISR
2	Pemeriksaan Microwave link Remote Site	80% x data target (5055) = 4044	4657 ISR
3	Pengukuran Radio FM	50 ISR	61 ISR
4	Pengukuran TV Digital	15 ISR	15 ISR

1. Kegiatan Pemeriksaan Microwave link melalui Open Shelter Pemeriksaan Stasiun Radio Pengguna Microwave Link dilaksanakan terhadap 1.004 stasiun radio dan telah mencapai 100% pemeriksaan telah melebihi minimal target yang ditetapkan sebesar 60%. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan didapati hasil sebagai berikut:

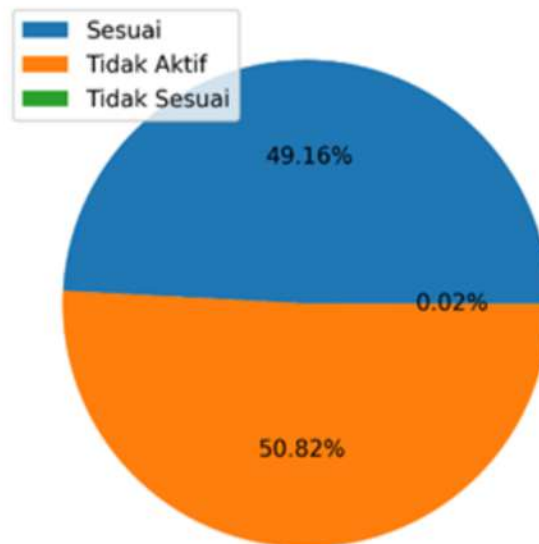


Capaian Open Shelter Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun 2025
(sumber: apstard.postel.go.id)

- 438 stasiun (43,58%) dinyatakan sesuai antara data perizinan dan kondisi aktual.
- 566 stasiun (56,32%) teridentifikasi dalam kondisi tidak aktif.
- 1 stasiun (0,10%) ditemukan dalam kategori pelanggaran remote site (tidak sesuai).
- Tidak ditemukan stasiun dengan status tidak berizin maupun tidak sesuai pada kategori utama.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas temuan berada pada kategori stasiun tidak aktif, yang memerlukan penyesuaian administrasi guna menjaga akurasi database ISR dan optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio. Tingkat kepatuhan perizinan secara umum tergolong baik, tercermin dari tidak ditemukannya penggunaan frekuensi tanpa izin. Secara keseluruhan, kegiatan Open Shelter ini mendukung tertib spektrum, peningkatan validitas data perizinan, serta penguatan pengawasan pemanfaatan frekuensi radio dalam rangka pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang efektif dan berkelanjutan.

2. Kegiatan Pemeriksaan Microwave link melalui Remote Site Pemeriksaan Stasiun Radio Pengguna Microwave Link dilaksanakan dengan target rencana pemeriksaan sebanyak 5.055 stasiun radio. Hingga periode pelaporan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.654 stasiun radio, dengan capaian sebesar 92% telah melebihi target Pemeriksaan Microwave link melalui Remote Site berdasarkan batas minimal yang di persyaratkan yaitu minimal 80%. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap stasiun radio yang telah diverifikasi didapati hasil sebagai berikut:



Capaian Open Shelter Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta
Tahun 2025
(sumber: apstard.postel.go.id)

- 2.288 stasiun (49.16%) dinyatakan sesuai antara data perizinan dan kondisi aktual di lapangan.
- 2.365 stasiun (50.82%) teridentifikasi dalam kondisi tidak aktif.
- 1 stasiun (0.02%) ditemukan dalam kategori tidak sesuai
- Tidak ditemukan stasiun radio yang berstatus tidak berizin

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas temuan berada pada kategori stasiun tidak aktif, yang memerlukan penyesuaian data administrasi guna menjaga akurasi database perizinan dan optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio. Tingkat kepatuhan terhadap aspek perizinan relatif baik, tercermin dari tidak ditemukannya stasiun tanpa izin. Secara keseluruhan, kegiatan Remote Site ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat validitas data ISR, meningkatkan tertib spektrum, serta mendukung efektivitas pengawasan pemanfaatan frekuensi radio dalam rangka pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang andal dan berkelanjutan.

3. Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM telah dilaksanakan pengukuran terhadap 58 Pemancar Stasiun Radio FM telah melebihi batas batas minimum terperiksa 50 Pemancar Stasiun Radio FM dengan rincian sebagai berikut:

KAB/KOTA	JUMLAH PEMANCAR STASIUN RADIO
ADM. KEP. SERIBU	1
BOGOR	5
JAKARTA BARAT	10
JAKARTA PUSAT	7
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	4
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	14
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2
KOTA BEKASI	4
KOTA BOGOR	4
KOTA DEPOK	4
Grand Total	58

4. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio TV Digital, untuk seluruh stasiun siaran TV Digital di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta telah dilakukan pengukuran terhadap 15 Stasiun MUX sehingga capaian pemeriksaan mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA PENYELENGGARA LAYANAN MULTIPLEKSING	WILAYAH		
		Jakarta Barat	Kab. Bekasi	Kab. Bogor
1	LATIVI MEDIA KARYA, PT.			
2	MEDIA TELEVISI INDONESIA, PT.			
3	METROPOLITAN TELEVISINDO, PT. (SFN JAKARTA)			
4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA			
5	PT. Surya Citra Televisi (SCTV SFN Jakarta)			
6	PT. Rajawali Citra Televisi (RCTI SFN Jakarta)			
7	PT. Televisi Transformasi Indonesia			
8	METROPOLITAN TELEVISINDO, PT. (SFN RTV Gunung Geulis)			
9	RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, PT. (SFN HAMBALANG)			
10	LATIVI MEDIA KARYA, PT. (TVONE SFN HAMBALANG)			
11	SURYA CITRA TELEVISI, PT. (SCTV BOGOR HAMBALANG SFN)			
12	LATIVI MEDIA KARYA, PT. (TVOne SFN Bekasi)			
13	METROPOLITAN TELEVISINDO, PT. (RTV SFN Bekasi)			
14	PT. Surya Citra Televisi (SCTV SFN Bekasi)			
15	PT. Rajawali Citra Televisi (RCTI SFN Bekasi)			

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Hasil pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan stasiun radio menjadi dasar bagi UPT dalam melakukan pembaruan dan validasi data perizinan ISR pada sistem database spektrum frekuensi radio. Temuan berupa stasiun radio yang tidak aktif akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi kepada pemegang ISR serta penyesuaian administrasi perizinan guna memastikan kesesuaian antara data perizinan dan kondisi aktual di lapangan. Sementara itu, temuan stasiun yang tidak sesuai akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan dan penyesuaian teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya akurasi dan validitas data perizinan stasiun radio, penguatan pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi radio, serta terciptanya tertib penggunaan spektrum yang mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

A. Aktor yang Mempengaruhi Keberhasilan :

1. Petugas lapangan yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam analisis Dalam pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan stasiun radio menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan stasiun radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menerapkan pendekatan kombinasi antara metode pemeriksaan Open Shelter dan Remote Site guna memperluas cakupan pemeriksaan secara lebih efektif. Pendekatan ini merupakan bentuk inovasi dalam pelaksanaan pengawasan spektrum yang mampu meningkatkan efektivitas kegiatan pemeriksaan dengan cakupan stasiun radio yang lebih luas.
3. Data dan informasi yang lengkap dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio yang meliputi: database SIMS/ISR, data parameter teknis stasiun radio, data spesifikasi teknis perangkat pemancar.

B. Kendala yang Dihadapi :

1. Memiliki kepadatan pemancar Stasiun radio dari berbagai jenis layanan sehingga data frekuensi yang diterima spektrum di lapangan harus selalu dianalisa karena sangat kompleks.
2. Masih terdapat sebagian kecil stasiun radio microwave link yang belum dapat diperiksa dan akan menjadi fokus penyelesaian pada periode kegiatan berikutnya.
3. Proses perizinan untuk mengakses suatu lokasi atau gedung membutuhkan koordinasi yang panjang terlebih dahulu.

Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- Personel yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas.
- Sistem remote site pada Network Monitoring System (NMS) operator dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) lebih efisien daripada pemeriksaan langsung oleh personel di lapangan. Sistem remote site pada Network Monitoring System (NMS) juga dapat membantu mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dan/atau tidak memiliki ISR secara real time.
- Sistem pelaporan secara on line yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio antara yakni APSTARD dan NEW ROL dapat membantu petugas di lapangan dalam melakukan pelaporan secara efisien dan tepat waktu.

- Implementasi Nilai Budaya BerAKhlak
- Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam penguatan tata kelola spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini mencerminkan orientasi pelayanan melalui upaya memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi bagi pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), sekaligus menjunjung tinggi akuntabilitas melalui validasi kesesuaian data pada Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dengan kondisi faktual di lapangan sesuai target dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Pemeriksaan yang dilaksanakan secara profesional menunjukkan kompetensi teknis dan integritas petugas dalam mengawasi kepatuhan pengguna Microwave Link, serta dilakukan secara harmonis dan kolaboratif dengan para pemegang ISR guna memastikan tindak lanjut yang konstruktif. Konsistensi pengawasan ini juga mencerminkan loyalitas terhadap kebijakan nasional dalam pengelolaan spektrum sebagai sumber daya strategis, adaptif terhadap dinamika perkembangan infrastruktur digital, serta berkontribusi dalam optimalisasi PNBPN BHP frekuensi radio untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal negara dan percepatan pembangunan konektivitas nasional yang andal dan berdaya saing.

Dokumentasi Kegiatan



IK-1.3 Persentase (%) Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio

Latar Belakang

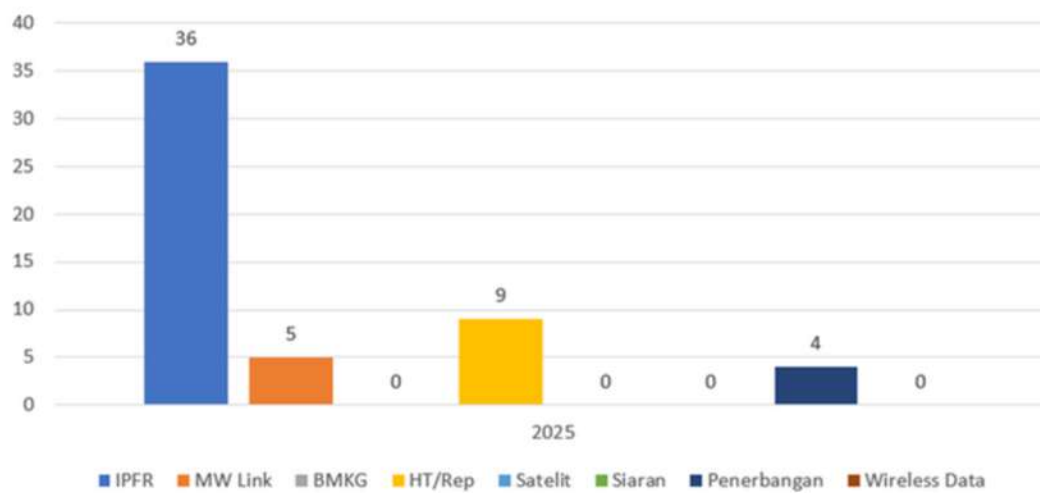
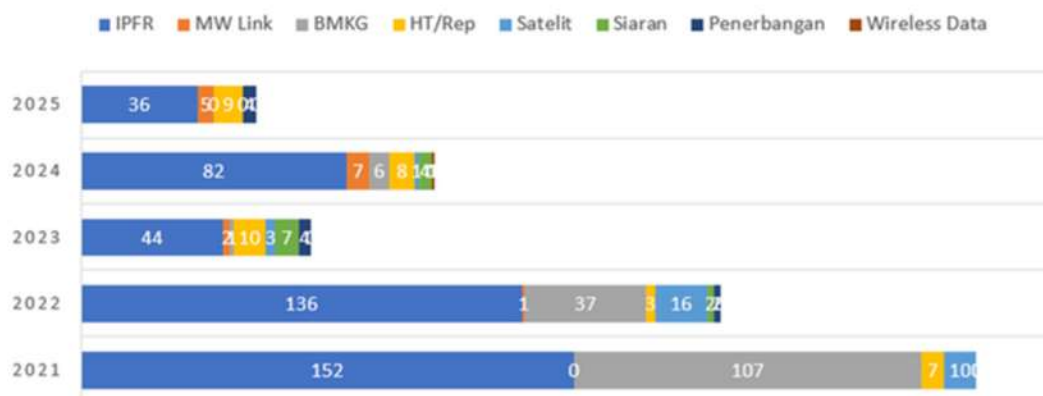
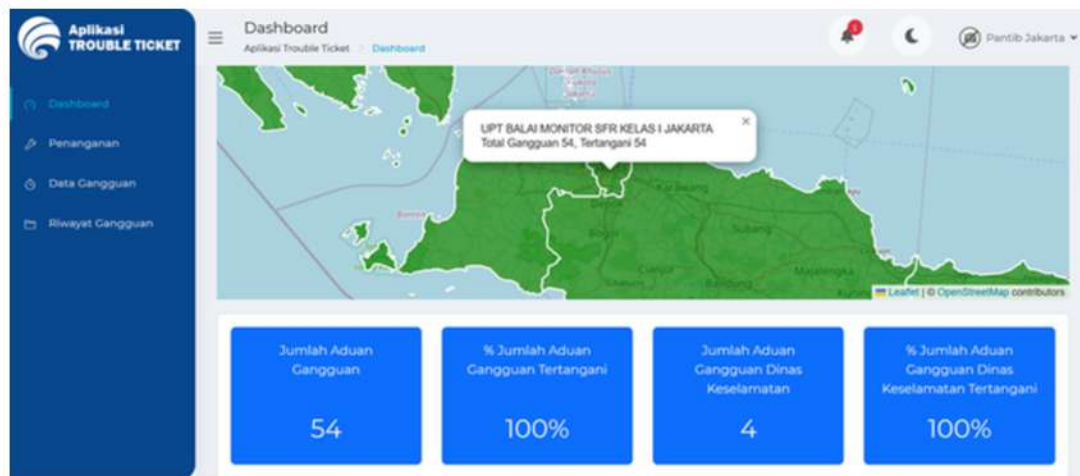
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi radio, potensi terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio (interferensi) juga semakin meningkat. Gangguan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan komunikasi radio yang digunakan oleh masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, maupun instansi pemerintah yang memanfaatkan frekuensi radio dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam rangka menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio serta memastikan layanan komunikasi dapat berjalan dengan baik, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta melaksanakan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio sebagai salah satu bentuk nyata pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio. Layanan ini diberikan kepada pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFR), maupun pengguna non pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) yang mengalami gangguan akibat interferensi frekuensi radio. Kegiatan tersebut meliputi proses penerimaan laporan atau aduan gangguan frekuensi radio dari pengguna, penyelenggara telekomunikasi, serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses analisis dan penyelesaian gangguan di lapangan.

Penanganan gangguan frekuensi radio dilakukan melalui serangkaian kegiatan teknis, antara lain pemantauan spektrum frekuensi radio, identifikasi sumber gangguan, analisis karakteristik sinyal, serta penelusuran lokasi sumber pancaran yang diduga menimbulkan interferensi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menemukan dan mendeteksi stasiun radio atau pengguna frekuensi radio yang menimbulkan gangguan pada pita frekuensi radio yang digunakan oleh pemegang ISR, pemegang IPSFR, maupun pengguna lainnya.

Melalui pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio, diharapkan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat berlangsung secara tertib, teratur, efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna frekuensi radio melakukan aktivitas pancaran setelah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang sah, menggunakan frekuensi sesuai dengan izin yang diberikan serta peruntukannya, dan dapat beroperasi tanpa menimbulkan maupun mengalami potensi interferensi dengan pengguna frekuensi radio lainnya. Dengan demikian, kualitas dan keandalan layanan komunikasi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dapat tetap terjaga dengan baik.

Capaian Kinerja



- Berdasarkan data penanganan gangguan pada Tahun 2025, aduan gangguan yang paling banyak ditangani oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berasal dari pita frekuensi Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) milik operator seluler, yaitu sebanyak 36 aduan gangguan atau sekitar 66,67% dari total keseluruhan aduan gangguan yang diterima. Sebagian besar gangguan tersebut disebabkan oleh penggunaan perangkat penguat sinyal (repeater) telepon seluler, serta perangkat ilegal yang tidak memiliki izin dan masih banyak dijual secara bebas di pasaran (marketplace) dengan harga yang relatif terjangkau. Penggunaan perangkat-perangkat tersebut berpotensi menimbulkan interferensi karena spesifikasi teknis dan frekuensi kerjanya tidak sesuai dengan standar frekuensi Mobile Broadband yang digunakan di Indonesia. Kondisi ini dapat mengganggu kualitas layanan jaringan seluler yang diselenggarakan oleh operator telekomunikasi.
- Pada Tahun 2025 terdapat 4 aduan gangguan pada frekuensi penerbangan yang ditangani oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta. Gangguan pada layanan penerbangan merupakan prioritas utama dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio karena berkaitan langsung dengan sistem komunikasi radio yang digunakan dalam operasional penerbangan dan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, setiap aduan gangguan pada frekuensi penerbangan harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam, guna mencegah potensi gangguan terhadap sistem komunikasi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia.
- Selain gangguan pada pita frekuensi operator seluler dan penerbangan, pada Tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta juga menangani 9 aduan gangguan pada layanan HT/Repeater serta 5 aduan gangguan pada jaringan Microwave Link (MW Link). Seluruh aduan gangguan yang diterima pada tahun tersebut telah ditindaklanjuti dan berhasil diselesaikan hingga tidak ditemukan kembali adanya gangguan pada lokasi tersebut (clear). Dalam proses penanganan gangguan di lapangan, dilakukan berbagai tindakan teknis dan administratif untuk menghentikan sumber interferensi. Tindakan tersebut antara lain penghentian pancaran perangkat yang menimbulkan gangguan, penyegelan perangkat, serta pengamanan perangkat yang digunakan secara tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa gangguan frekuensi radio dapat segera dihentikan sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta tetap berlangsung secara tertib dan tidak saling mengganggu.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan dan berkala di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta guna memastikan penggunaan frekuensi radio tetap tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pengguna spektrum frekuensi radio, termasuk penyelenggara telekomunikasi dan instansi terkait, dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio.
- Melakukan penertiban terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk perangkat yang tidak memiliki izin atau berpotensi menimbulkan interferensi terhadap pengguna frekuensi lainnya.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengguna spektrum frekuensi radio melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara legal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dan hasil monitoring spektrum frekuensi radio sebagai dasar evaluasi dan pengambilan langkah pengawasan untuk mencegah terjadinya gangguan frekuensi radio di masa mendatang.

Inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

- Melakukan evaluasi terhadap data gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi pada tahun sebelumnya, termasuk jenis gangguan, pita frekuensi yang terdampak, serta wilayah kejadian. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi penanganan dan langkah pencegahan yang lebih efektif pada periode berikutnya.
- Membentuk tim respons cepat yang memiliki kompetensi teknis dalam monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Tim ini bertugas untuk melakukan penanganan gangguan secara cepat dan tepat di lapangan sehingga dampak gangguan terhadap layanan komunikasi dapat diminimalkan.
- Mengoptimalkan sistem monitoring spektrum frekuensi radio yang ada, baik melalui stasiun monitoring tetap maupun perangkat monitoring bergerak, guna mendeteksi potensi gangguan sejak dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan penanganan.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap prosedur operasional standar (SOP) penanganan gangguan frekuensi radio agar proses penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, terstandarisasi, dan responsif terhadap berbagai jenis gangguan.
- Menggunakan data hasil monitoring dan penanganan gangguan untuk melakukan analisis tren gangguan frekuensi radio. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola gangguan yang sering terjadi serta merumuskan langkah-langkah preventif guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi terbaru yang berpotensi mempengaruhi penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan demikian, personel dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan yang muncul seiring perkembangan teknologi.
- Meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, instansi terkait, serta pengguna spektrum frekuensi radio dalam rangka mempercepat proses identifikasi dan penyelesaian gangguan serta mencegah terjadinya interferensi di kemudian hari.

Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta menerapkan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi, analisis, serta penyelesaian gangguan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi monitoring yang tersedia. Pemantauan tersebut dilakukan melalui jaringan stasiun monitoring tetap (fixed station) maupun perangkat monitoring bergerak (transportable) yang tersebar di wilayah kerja. Dengan dukungan jaringan monitoring tersebut, proses deteksi terhadap potensi gangguan frekuensi radio dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Selain itu, efisiensi penanganan gangguan juga didukung oleh pemanfaatan sistem pelaporan gangguan frekuensi radio melalui aplikasi Trouble Ticket. Sistem ini memungkinkan pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggara telekomunikasi, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan gangguan secara lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui sistem tersebut, setiap laporan gangguan dapat dipantau status penanganannya secara terintegrasi, mulai dari tahap penerimaan laporan, proses analisis, hingga penyelesaian gangguan. Informasi yang tercatat dalam sistem juga dapat dimanfaatkan sebagai basis data untuk mendukung proses analisis gangguan serta mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan serupa di masa mendatang.

Dengan menerapkan berbagai langkah tersebut, kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan, maupun proses pelaporan dan dokumentasi hasil penanganan gangguan. Hal ini pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pelayanan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dalam menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

Implementasi Nilai Budaya Berakhlak

Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dilaksanakan dengan mengedepankan penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna spektrum frekuensi radio. Implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam setiap tahapan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio, mulai dari penerimaan laporan gangguan hingga penyelesaian gangguan di lapangan.

• Berorientasi Pelayanan

Diwujudkan melalui respons yang cepat dan tanggap terhadap setiap aduan gangguan frekuensi radio yang disampaikan oleh pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), maupun pengguna lainnya. Setiap laporan gangguan ditindaklanjuti secara profesional agar layanan komunikasi radio yang terganggu dapat segera kembali beroperasi dengan normal.

- **Akuntabel**

Diterapkan melalui pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses penanganan gangguan didokumentasikan dan dilaporkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga hasil kegiatan dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

- **Kompeten**

Tercermin dari kemampuan personel dalam melakukan pemantauan, analisis spektrum frekuensi radio, serta identifikasi sumber gangguan dengan menggunakan perangkat monitoring yang tersedia. Kompetensi tersebut terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi.

- **Harmonis**

Diwujudkan melalui terjalinnya hubungan kerja yang baik antara personel Balmon SFR Kelas I Jakarta dengan para pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggara telekomunikasi, serta instansi terkait dalam proses penanganan gangguan frekuensi radio.

- **Loyal**

Tercermin dari komitmen seluruh personel dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan frekuensi radio sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

- **Adaptif**

Ditunjukkan melalui kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan dinamika penggunaan spektrum frekuensi radio, termasuk dalam pemanfaatan sistem monitoring dan perangkat pengukuran yang terus berkembang.

- **Kolaboratif**

Diwujudkan melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mempercepat proses identifikasi serta penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio.

Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Jumlah Aduan Gangguan	Jumlah Aduan Gangguan	Capaian
Balmon SFR Kelas I Jakarta	54	54	100%
Balmon SFR Kelas I Bandung	14	14	100%

Berdasarkan hasil benchmark kinerja antar Unit Pelaksana Teknis, Balmon SFR Kelas I Jakarta dan Balmon SFR Kelas I Bandung sama-sama menunjukkan capaian kinerja yang optimal dalam penanganan aduan gangguan, dengan masing-masing mencatatkan tingkat penyelesaian 100% sepanjang tahun 2025. Balmon SFR Kelas I Jakarta menerima sebanyak 54 aduan gangguan dan berhasil menuntaskan seluruhnya, sementara Balmon SFR Kelas I Bandung menerima 14 aduan gangguan dan juga menyelesaikan seluruh penanganannya dengan tuntas.

Tingginya jumlah aduan yang ditangani oleh Balmon SFR Kelas I Jakarta mencerminkan tingginya dinamika aktivitas telekomunikasi di wilayah ibu kota, yang ditandai dengan padatnya pengguna spektrum frekuensi radio, kompleksitas lingkungan perkotaan yang rentan terhadap interferensi, serta banyaknya penyelenggara telekomunikasi yang beroperasi secara simultan. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan dan respons cepat dari petugas di lapangan dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyelesaikan setiap gangguan yang dilaporkan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun menghadapi beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan UPT pembanding, Balmon SFR Kelas I Jakarta mampu mempertahankan kualitas pelayanan dengan memastikan seluruh aduan gangguan dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme pengawasan spektrum, profesionalisme sumber daya manusia, serta dukungan sarana prasarana yang memadai dalam menjamin kelancaran layanan telekomunikasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta dalam memberikan perlindungan kepada pengguna spektrum frekuensi radio serta menjaga kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan



IK-1.4 Persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat Telekomunikasi dan Digital

Latar Belakang

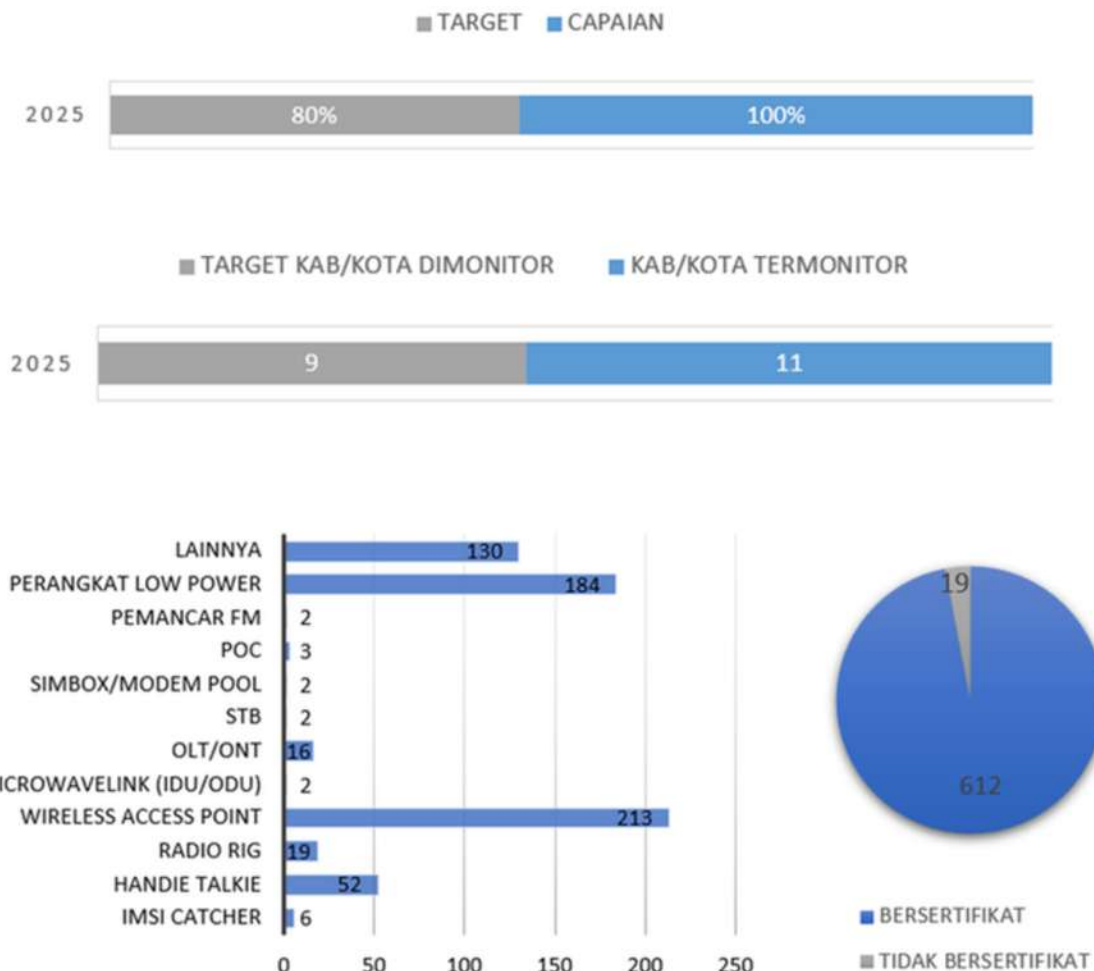
Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat mendorong meningkatnya penggunaan berbagai alat dan perangkat telekomunikasi di masyarakat. Perangkat tersebut digunakan dalam berbagai layanan komunikasi, seperti jaringan telekomunikasi seluler, penyiaran, komunikasi radio, serta layanan berbasis data lainnya. Dalam penggunaannya, setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis serta memiliki sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah guna memastikan perangkat tersebut aman digunakan, tidak menimbulkan gangguan elektromagnetik, dan tidak mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pengguna lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balmon SFR Kelas I Jakarta melaksanakan kegiatan monitoring alat dan perangkat telekomunikasi sebagai bagian dari tugas pengawasan terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi di wilayah kerjanya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan oleh masyarakat maupun penyelenggara telekomunikasi telah memenuhi ketentuan perizinan dan standar teknis yang berlaku.

Melalui kegiatan monitoring ini, Balmon SFR Kelas I Jakarta melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi di lapangan, termasuk melakukan identifikasi terhadap perangkat yang tidak memiliki sertifikasi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan monitoring alat dan perangkat telekomunikasi diharapkan dapat mendukung terciptanya penggunaan perangkat telekomunikasi yang tertib, aman, dan tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap spektrum frekuensi radio serta layanan telekomunikasi lainnya.

Capaian Kinerja

Target	: a. Jenis perangkat prioritas:	
	1. HF All Band Transceiver	11. Handy Talkie (HT)
	2. Mobile Transceiver/Radio Rig	12. Radio POC
	3. Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)	13. Set Top Box
	4. Pemancar FM	14. Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)
	5. Simbox/Modempool	15. Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT)
	6. Fake BTS/IMSI Catcher	16. Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan
	7. Repeater/Penguat Sinyal Seluler	
	8. Jammer	
	9. GPS Tracker	
	10. Microwavelink (IDU/ODU)	



Selama Tahun 2025, Balmon SFR Kelas I Jakarta telah melaksanakan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi sebanyak 15 kali di Kab/Kota. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 631 unit perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan di masyarakat maupun oleh penyelenggara telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 612 perangkat diketahui telah memiliki sertifikat dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih ditemukan 19 perangkat yang belum memiliki sertifikat, sehingga memerlukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan perangkat yang belum memiliki sertifikat sebagai berikut:

No	Nama Perangkat	Merk	Tipe/Model
1	Cloud Core Router	X86	TRUE PERFORMANCE
2	EPON OLT	Jo-Link	JL08-L3
3	Swicth	D-Link	DGS-1016C
4	OLT EPON	HISFOCUS	2P1GDC

5	Fo Ethernet Converter	-	PCB Board 2 RJ45 6 SC
6	Firewall	SOPHOS	SG 330
7	Router	Cisco Catalyts	3650 48 4X1G
8	XPON ONU	Huawei	Echolife HG85446M
9	Desktop Switch	Ubiquiti	PBE-M5-300
10	OLT EPON	Hisfocus	4P1GM
11	Wireless Range	Linksys	RE2000-AP
12	Wireless Range	TREND NET	TEW-737HRE
13	Wireless Router	ASUS	RT-AC55U
14	Digital Satellite	OPEN BOX	S10 HD PVR
15	Digital Cordless Phone	Panasonic	KX-TG1611
16	Wireless Mouse	Nippontech	M100
17	Wireless Game	-	CM-029
18	Wireless Game	-	CM-019D
19	Wireless Game	-	CM-019

Inovasi, Keberhasilan/Ketidakcapaian

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan :

- Keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi di wilayah Kab/Kota selama Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, baik dari segi jumlah maupun kemampuan teknis dalam melakukan identifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi alat/perangkat telekomunikasi di lapangan.
- Faktor lain yang turut berperan adalah perencanaan kegiatan yang terstruktur dan terjadwal dengan baik, sehingga pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara sistematis dan mampu menjangkau berbagai wilayah kabupaten/kota di wilayah kerja. Di samping itu, koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, pengelola pusat perbelanjaan, distributor perangkat, serta pemangku kepentingan terkait juga menjadi unsur penting dalam mendukung kelancaran kegiatan monitoring di lapangan.

- Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi dan basis data perangkat telekomunikasi bersertifikat, yang memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi status sertifikasi perangkat secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat dalam menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikasi resmi turut memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pengawasan. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengawasan peredaran dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tidak kalah penting, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

B. Kendala yang Dihadapi

- Masih ditemukannya perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dan beredar secara bebas di pasaran, baik melalui toko fisik maupun platform perdagangan daring. Kondisi ini menyulitkan proses pengawasan karena perangkat tersebut berpotensi digunakan oleh masyarakat tanpa memenuhi ketentuan standar teknis yang berlaku.
- Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha maupun masyarakat mengenai kewajiban penggunaan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikasi resmi. Hal ini menyebabkan masih adanya perangkat yang diperjualbelikan atau digunakan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja serta banyaknya lokasi peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh titik pengawasan secara optimal.
- Perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi yang sangat cepat, sehingga berbagai jenis dan model perangkat baru terus bermunculan di pasaran. Hal ini memerlukan kemampuan identifikasi dan verifikasi yang lebih cermat dari petugas dalam memastikan status sertifikasi perangkat.
- Peredaran perangkat melalui platform perdagangan daring (e-commerce) yang semakin meningkat juga menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan pengawasan. Perangkat tanpa sertifikasi dapat dengan mudah dipasarkan dan dibeli oleh masyarakat melalui berbagai platform digital.
- Keterbatasan akses pada beberapa lokasi penjualan atau penggunaan perangkat telekomunikasi, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pengelola lokasi maupun pihak terkait agar kegiatan monitoring dapat dilaksanakan dengan lancar.

- Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi dan basis data perangkat telekomunikasi bersertifikat, yang memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi status sertifikasi perangkat secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat dalam menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikasi resmi turut memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pengawasan. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengawasan peredaran dan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tidak kalah penting, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

B. Kendala yang Dihadapi

- Masih ditemukannya perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat dan beredar secara bebas di pasaran, baik melalui toko fisik maupun platform perdagangan daring. Kondisi ini menyulitkan proses pengawasan karena perangkat tersebut berpotensi digunakan oleh masyarakat tanpa memenuhi ketentuan standar teknis yang berlaku.
- Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha maupun masyarakat mengenai kewajiban penggunaan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikasi resmi. Hal ini menyebabkan masih adanya perangkat yang diperjualbelikan atau digunakan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja serta banyaknya lokasi peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh titik pengawasan secara optimal.
- Perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi yang sangat cepat, sehingga berbagai jenis dan model perangkat baru terus bermunculan di pasaran. Hal ini memerlukan kemampuan identifikasi dan verifikasi yang lebih cermat dari petugas dalam memastikan status sertifikasi perangkat.
- Peredaran perangkat melalui platform perdagangan daring (e-commerce) yang semakin meningkat juga menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan pengawasan. Perangkat tanpa sertifikasi dapat dengan mudah dipasarkan dan dibeli oleh masyarakat melalui berbagai platform digital.
- Keterbatasan akses pada beberapa lokasi penjualan atau penggunaan perangkat telekomunikasi, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pengelola lokasi maupun pihak terkait agar kegiatan monitoring dapat dilaksanakan dengan lancar.

Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi di wilayah Kab/Kota, Balmon SFR Kelas I Jakarta telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan:

- Penggunaan basis data perangkat bersertifikat (Sirani) dioptimalkan untuk mempermudah petugas memverifikasi status sertifikasi secara cepat dan akurat. Langkah ini secara signifikan memangkas waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk pengecekan manual di lapangan.
- Kegiatan pengawasan dirancang secara terstruktur dengan menentukan lokasi berdasarkan tingkat risiko, volume peredaran perangkat, dan hasil evaluasi periode sebelumnya. Pendekatan ini memastikan alokasi sumber daya dan target operasi menjadi lebih tepat sasaran.
- Peningkatan koordinasi terus dijalin dengan pemerintah daerah, pengelola pusat perbelanjaan, serta para pelaku usaha. Melalui sinergi yang baik, proses pengawasan dapat dieksekusi secara efisien pada beberapa titik lokasi dalam satu waktu.
- Mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, kegiatan pemeriksaan perangkat telekomunikasi digabungkan pelaksanaannya dengan kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio pada wilayah kerja yang sama.
- Program sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Langkah preventif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan penggunaan perangkat bersertifikat, sehingga potensi pelanggaran di kemudian hari dapat diminimalkan.

IK-1.5 Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT

Latar Belakang

Indikator Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT ditetapkan untuk memastikan bahwa kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur terjaga dengan baik agar fungsi perangkat tetap maksimal guna mendukung tugas dan fungsi utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta yaitu melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja yang terdiri dari:

- Provinsi DKI Jakarta
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
- Kota Depok
- Kota Bekasi, dan
- Kabupaten Bekasi.

Perangkat SMFR dibagi menjadi beberapa jenis perangkat, yaitu Stasiun Tetap, Stasiun Transportable, Stasiun Mobile dan Portable. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki 4 (empat) stasiun tetap, terdiri dari 1 (satu) stasiun master ciracas dan 3 (tiga) stasiun slave yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.



Stasiun Slave Maninjau
(Koordinat 06° 19' 24" S 106° 49' 14" E)



Stasiun Slave Bambularangant
(Koordinat 06° 08' 10" S 106° 42' 47" E)



Stasiun Slave Rorotan
(Koordinat 06° 09' 18" S 106° 57' 51" E)

Guna mendukung kegiatan monitoring, okupansi dan penanganan gangguan di wilayah kerja, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta juga memiliki 4 (empat) stasiun monitor transportable yang telah ditempatkan di Jakarta Pusat, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Pulau Tidung Kepulauan Seribu.



Stasiun Transportable GSP Lt.24
(Koordinat 06° 10' 46.2" S 106° 49' 17.93" E)



Stasiun Transportable Kepulauan Seribu
(Koordinat 5° 47' 43.0872" S 106° 29' 44.4588" E)



Stasiun Transportable Bogor
(Koordinat 6° 35' 57.8148" S 106° 48' 35.2512" E)



Stasiun Transportable Bekasi
(Koordinat 6° 15' 43.1136" S 106° 59' 54.024" E)

Selain memiliki 4 (empat) stasiun monitor tetap dan 3 (tiga) stasiun monitor transportable, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta juga memiliki 2 (dua) stasiun Mobile Mon/DF yaitu Stasiun Monitor Bergerak V/UHF Mobil SUV-4WD Land Rover Tipe Defender yang dilengkapi dengan Perangkat Digital Direction Finder Rohde & Schwarz (R&S) Tipe DDF-255 dan mobil monitoring SUV Merk Isuzu tipe MUX dengan instalasi perangkat Mon/DF pabrikan Rohde & Schwarz (R&S) dengan Type ESMD serta beberapa perangkat pendukung pengukuran portable lainnya.



Stasiun Bergerak Mon/DF R&S DDF-255 (Mobil Land Rover Defender 110SW)



Stasiun Bergerak Mon/DF R&S ESMD (Mobil SUV Merk Isuzu tipe MUX)

Capaian indikator kinerja “Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT” tercermin dengan kesiapsediaan dan berfungsinya perangkat utama dan pendukung SMFR dan alat monitor/ukur yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta saat ini, dimana perangkat tersebut harus selalu tersedia saat dibutuhkan dan siap digunakan oleh para Pengendali Frekuensi Radio (PFR) dalam segala jenis kegiatan pemantauan dan pengukuran frekuensi radio dengan tingkat keakuratan perangkat yang dapat diandalkan. Hal tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan rutin inspeksi pemeliharaan maupun perbaikan perangkat SMFR. Adapun dasar kegiatan pemeliharaan perbaikan perangkat SMFR tersebut mengacu pada Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor 838/DJSDPPI/.4/SP.03.01/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat SMFR.

Capaian kinerja

Kinerja	Indikator Kinerja	2024		2025		2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	85%	9,175%	86%

Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 85%. Penurunan target capaian PK terjadi karena terjadinya efisiensi anggaran pada tahun berjalan yang membatasi upaya pemeliharaan perangkat karena keterbatasan anggaran. Meskipun pada pelaksanaannya Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta tetap dapat mencapai target dengan capaian sebesar 91,75% dengan kalkulasi persentase capaian sebesar 107,94%. Pada aplikasi SMFR terdaftar jumlah rincian daftar perangkat utama dan pendukung maupun alat ukur SMFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta untuk periode tahun 2025 sebanyak 34 perangkat utama dan 20 perangkat pendukung dengan persentase kesiapan harian total hingga mencapai 100%.

Kondisi SMFR Stasiun Mon/DF Tetap dan Transportable di akhir tahun 2025

No	Stasiun Monitor / DF	Kondisi Saat Ini	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Stasiun Mon/DF Tetap TCI Maninjau (Jakarta Selatan)	Rusak	2013	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem AoA (Kerusakan Modul Antenna)
2	Stasiun Mon/DF Tetap TCI Rorotan (Jakarta Utara)	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem AoA
3	Stasiun Mon Transportable TCI Bogor	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
4	Stasiun Mon Transportable TCI Bekasi	Rusak	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA (Kerusakan pada perangkat utama)
5	Stasiun Mon Transportable TCI Kepulauan Seribu	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
6	Stasiun Mon Transportable TCI Lt. 24 GSP (Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat)	Baik	2024	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
7	Stasiun Mon/DF Tetap TCI Bambularangan (Jakarta Barat)	Baik	2024	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem AoA

Salah satu upaya untuk menjaga fungsi perangkat/alat ukur tetap akurat adalah dengan melakukan kalibrasi rutin terhadap perangkat/alat ukur yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan mendaftarkan kalibrasi perangkat yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Capaian 5 Tahun terakhir

Berikut ini adalah perbandingan capaian untuk indikator kinerja “Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT”:

Tahun Anggaran	Target	Capaian
2021	85%	9,753%
2022	95%	9,910%
2023	95%	100%
2024	95%	100%
2025	85%	9,175%

Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta mampu untuk meningkatkan dan tetap mempertahankan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan meskipun pada tahun anggaran 2025 terjadi efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan kegiatan yang terlaksana dilakukan dengan tepat dan efektif dalam menjaga operasional dan fungsi perangkat monitoring frekuensi radio sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Berikut adalah perbandingan jumlah stasiun monitor yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan UPT lainnya:

Nama UPT	Jumlah Stasiun Monitor				Luas Wilayah (km ²)	Capaian
	<i>Fix</i>	<i>Transportable</i>	<i>Portable</i>	<i>Mobile</i>		
UPT Jakarta	3	4	9	2	4.934,43	91,75 %
UPT Tangerang	6	2	18	2	9.160,70	100 %

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta memiliki jumlah stasiun monitor yang lebih sedikit dibandingkan dengan UPT Tangerang, hal ini wajar karena UPT Tangerang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan UPT Jakarta. Namun secara kinerja baik UPT Jakarta dan UPT Tangerang sama-sama dapat mencapai target kinerja meskipun secara persentase capaian UPT Jakarta lebih kecil dibandingkan UPT Tangerang. Dalam hal ini UPT Jakarta dapat menjadikan capaian UPT Tangerang sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi dan kompetensi teknis petugas pemeliharaan perangkat SMFR agar dapat menjaga operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitoring frekuensi radio di UPT.

Dengan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT, maka kegiatan monitoring frekuensi radio menggunakan stasiun slave/transportable dalam rangka monitoring frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat terlaksana dengan optimal.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Dengan melakukan kegiatan inspeksi perangkat SMFR secara rutin, kondisi dan kinerja perangkat SMFR dapat tercatat secara berkala dalam dokumentasi dan pelaporan kegiatan. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan atau malfungsi perangkat yang menyebabkan terganggunya operasional dan kegiatan monitoring frekuensi radio.

Untuk kedepannya rangkaian kegiatan tersebut akan diupayakan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan anggaran, dengan demikian diharapkan target capaian kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR yang akan dilaksanakan di tahun 2026 dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan hasil yang lebih optimal dan memuaskan.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Indikator kinerja “Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT” dapat tercapai karena beberapa hal berikut:

- Adanya aplikasi SMFR (smfr.postel.go.id) yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI yang memudahkan dalam melakukan pelaporan secara online dan melakukan perhitungan capaian PK secara otomatis.
- Adanya aplikasi SMSN (smsn.postel.go.id) yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI yang memudahkan dalam memantau fungsi perangkat secara real-time.
- Sinergi dan kerjasama yang baik antar anggota tim kerja sehingga seluruh kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR dapat dilakukan sesuai dengan SOP dengan hasil yang memuaskan.

Efisiensi

Pelaporan telah dilakukan secara online melalui aplikasi SMFR, petugas pemeliharaan UPT dapat langsung melaporkan data hasil inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan langsung secara online, dengan demikian tugas dan fungsi petugas pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

Implementasi Nilai Budaya Berakhlak

Dalam menunjang target “Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT”, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut :

Berorientasi Pelayanan

- Petugas pemeliharaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna spektrum frekuensi radio agar pemanfaatan spektrum tidak terganggu dengan menjaga operasional dan fungsi stasiun monitor agar dapat dimanfaatkan penuh oleh pengendali frekuensi radio dalam melaksanakan kegiatan monitoring, penanganan gangguan maupun pengukuran parameter teknis frekuensi radio guna ketertiban penggunaan, memastikan perangkat SMFR berfungsi dengan baik dan akurat untuk pemanfaatan kapanpun dan dimanapun.
- Selalu melakukan analisa evaluasi terhadap karakteristik dan akurasi perangkat serta pemeliharaan dan perbaikan perangkat agar lebih optimal.

Akuntabel

- Petugas pemeliharaan melaksanakan tugas inspeksi pemeliharaan dan perbaikan perangkat dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- Petugas pemeliharaan memiliki komitmen tanggung jawab, integritas, kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pemeliharaan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam memanfaatkan, menjaga dan memelihara perangkat yang merupakan barang milik negara dalam segala tugas kegiatan secara baik;

Kompeten

- Petugas pemeliharaan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam segala hal yang diperlukan disamping berusaha mengembangkan ilmu dan pengalaman untuk meningkatkan kompetensi terkait tugas dan fungsi.
- Ketika melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR, petugas pemeliharaan selalu melakukan sharing knowledge antar sesama petugas untuk meningkatkan kompetensi teknis yang dimiliki.

Harmonis

- Petugas pemeliharaan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tugas pemeliharaan perangkat dan bekerjasama dengan rekanan lain yang ada di lingkungan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta.
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu kepada sesama, pengetahuan dan pengalaman antar setiap petugas pemeliharaan.

Loyal

- Taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses kegiatan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan yang ditetapkan dan secara rutin tanggap melaporkan segala anomali yang terjadi maupun hasil kegiatan pemeliharaan kepada pimpinan

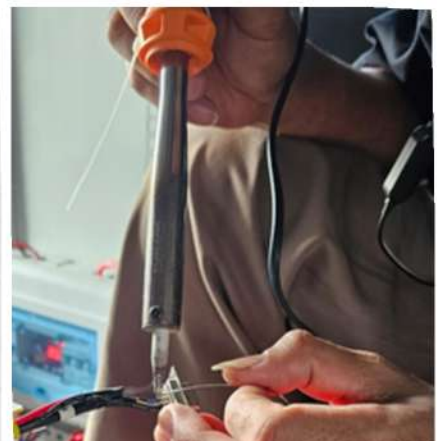
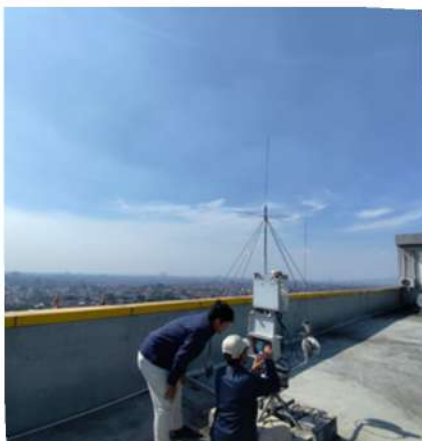
Adaptif

- Petugas pemeliharaan tanggap dan mampu beradaptasi dengan perubahan sistem monitoring dan pelaporan secara digital melalui aplikasi berbasis web;
- Petugas pemeliharaan mengikuti workshop pemeliharaan perangkat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Kolaboratif

- Menerapkan koordinasi yang baik dan bekerjasama efektif dengan Tim Kerja lainnya di lingkup lingkungan kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta seperti Bagian Umum, Tim Kerja Monitoring dan Tim Kerja Penertiban untuk memastikan fungsi infrastruktur perangkat SMFR berada dalam kondisi optimal.

Dokumentasi Kegiatan



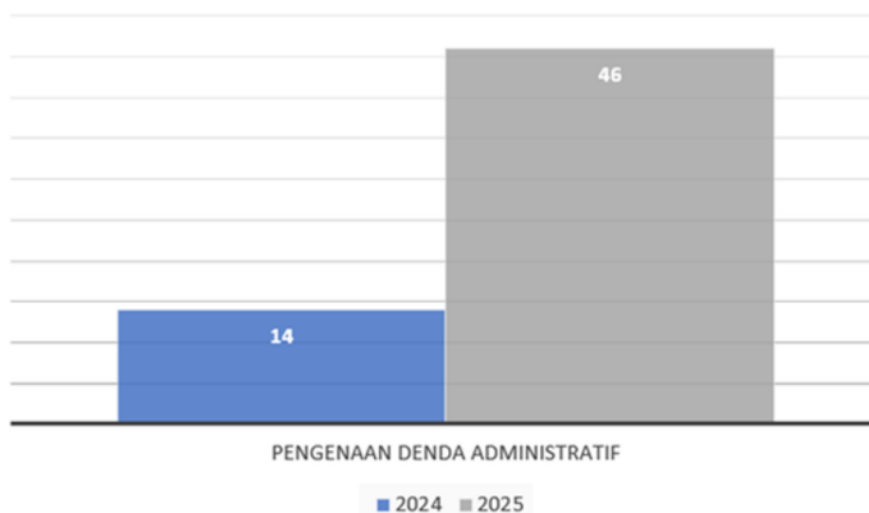
IK-1.6 Persentase (%) penanganan denda administratif

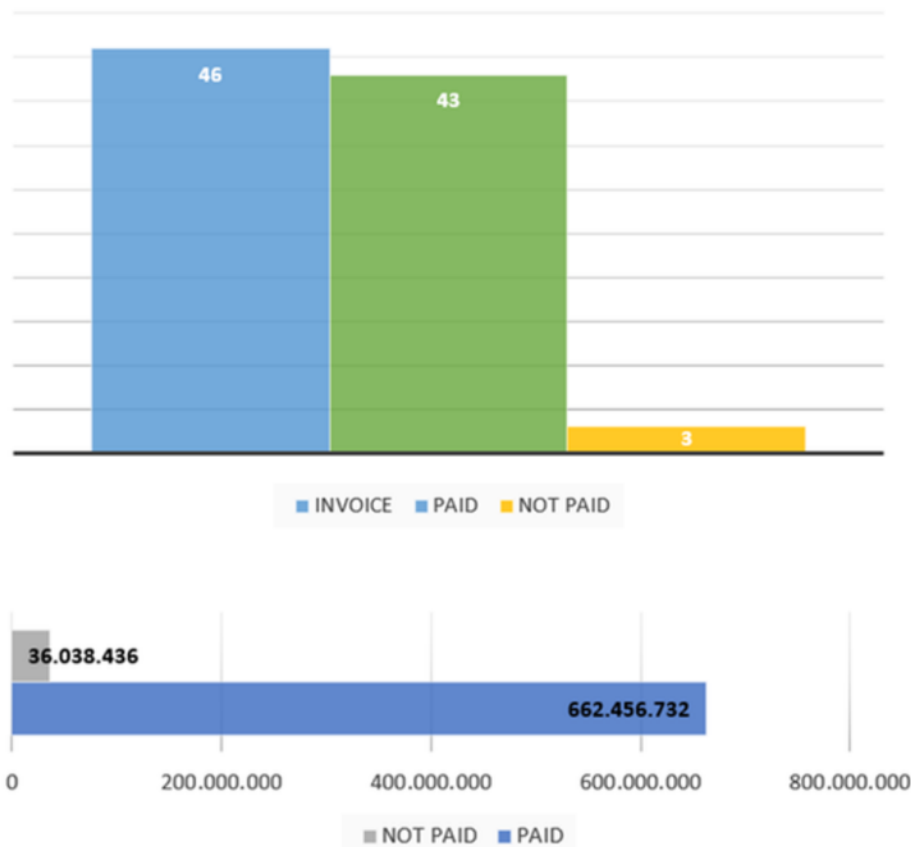
Latar Belakang

Penanganan sanksi denda administratif merupakan salah satu tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Melalui kegiatan monitoring dan penertiban tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas I Jakarta dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan spektrum frekuensi radio maupun penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah kerjanya. Terhadap pelanggaran yang ditemukan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya berupa sanksi denda administratif.

Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi denda administratif meliputi pelanggaran terkait Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFR), serta penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat. Pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) pengenaan sanksi denda administratif, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, serta Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Melalui penerapan sanksi denda administratif tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengguna spektrum frekuensi radio dan pelaku usaha telekomunikasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendorong terciptanya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efektif, dan tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap pengguna lainnya.

Capaian kinerja



Capaian Pengenaan Denda Administratif di Kab/Kota Tahun 2025
(sumber: dendaadministratif.postel.go.id)

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau Alat Perangkat Telekomunikasi yang terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi berupa denda administratif. Proses pengenaan denda administratif tersebut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP didukung oleh petugas yang secara resmi ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan surat tugas, sehingga keseluruhan proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Surat penetapan ini memuat secara jelas besaran denda yang harus dibayarkan, jangka waktu penyelesaian, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dengan tujuan utama untuk menegakkan kepatuhan hukum di bidang telekomunikasi serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor PNBP.

Sebagai implementasi dari mekanisme tersebut, sepanjang tahun 2025 Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta telah menerbitkan sebanyak 45 invoice Surat Penetapan Denda Administratif (SPPD) yang tersebar di Kab/Kota. Penerbitan invoice tersebut merupakan bentuk nyata pengawasan dan penindakan di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap pengguna spektrum frekuensi radio mematuhi ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan :

Keberhasilan pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif di lingkungan Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Ketersediaan petugas yang tidak hanya memahami regulasi teknis di bidang spektrum frekuensi radio, tetapi juga memiliki integritas dan kapabilitas dalam proses verifikasi, pemeriksaan, hingga penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap penindakan berlandaskan hukum yang berlaku.
- Adanya landasan hukum yang kuat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstandardisasi dalam penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif memberikan kepastian hukum bagi para pemegang izin sekaligus meminimalisasi potensi gugatan atau kendala administratif di kemudian hari.
- Intensitas monitoring yang didukung oleh surat tugas yang sah memungkinkan petugas untuk melakukan identifikasi pelanggaran secara akurat. Semakin optimal pengawasan yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap kewajibannya.
- Dukungan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi memudahkan proses penerbitan invoice Surat Penetapan Denda Administratif, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sanksi denda administratif di lingkungan Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Tingkat kepatuhan dan respons subjek pengenaan denda yang bervariasi, tidak semua pelanggar merespons secara kooperatif terhadap penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif. Beberapa di antaranya melakukan penundaan pembayaran, mengajukan keberatan, atau bahkan mengabaikan surat penetapan yang telah diterbitkan, sehingga memperlambat proses penyelesaian dan optimalisasi PNBP.
- Dengan jumlah petugas yang tersedia dan cakupan Kab/Kota yang luas, pelaksanaan monitoring dan penindakan tidak selalu dapat menjangkau seluruh wilayah secara simultan.
- Masih terbatasnya pemahaman para pengguna spektrum frekuensi radio mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan menjadi kendala tersendiri dalam penegakan aturan. Minimnya sosialisasi yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan mengakibatkan sebagian pelanggar tidak menyadari kewajiban dan risiko sanksi yang akan diterima, sehingga ketika denda ditetapkan, muncul resistensi atau klaim ketidaktahuan yang berujung pada proses penyelesaian yang berkepanjangan.

Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif di Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta diwujudkan melalui berbagai upaya strategis dan operasional, antara lain:

- Dilakukan optimalisasi tahapan proses, mulai dari identifikasi pelanggaran, verifikasi lapangan, hingga penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif, tanpa mengurangi prinsip ketelitian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pencatatan, penerbitan invoice, dan pelaporan memungkinkan petugas untuk memproses invoice SPPD secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga meminimalisasi hambatan administratif.
- Dengan cakupan wilayah yang luas, efisiensi dicapai melalui pengelolaan beban kerja dan penugasan petugas berbasis prioritas serta pemanfaatan sarana prasarana secara maksimal, sehingga pengawasan tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan jumlah personel.
- Efisiensi yang diterapkan pada seluruh rangkaian proses penanganan sanksi berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara, memastikan bahwa setiap denda administratif yang ditetapkan dapat direalisasikan secara tepat waktu dan memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi.

Implementasi Nilai Budaya BerAKhlak

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan sanksi denda administratif, Kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta senantiasa menginternalisasikan nilai-nilai budaya BerAKHLAK sebagai fondasi perilaku dan etika kerja seluruh petugas. Implementasi tersebut diwujudkan sebagai berikut:

- **Berorientasi Pelayanan**

Petugas memberikan pelayanan yang responsif dan empatik kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pelanggar yang dikenakan sanksi. Proses penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif dilakukan dengan jelas, transparan, dan disertai penjelasan yang memadai agar subjek denda memahami hak dan kewajibannya, sehingga tercipta kepatuhan sukarela dan mengurangi potensi konflik.

- **Akuntabel**

Setiap tahapan penanganan sanksi, mulai dari identifikasi pelanggaran hingga penerbitan invoice SPPD, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Seluruh dokumen dan proses terdokumentasi dengan baik, memastikan bahwa setiap denda yang ditetapkan memiliki dasar yang sah dan transparan dalam pengelolaan PNBP.

- **Kompeten**

Petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dibekali dengan pemahaman regulasi yang mendalam serta keterampilan teknis dalam melakukan verifikasi pelanggaran spektrum frekuensi radio. Peningkatan kompetensi berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga proses penentuan sanksi berjalan akurat dan profesional.

- **Loyal**

Petugas menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap visi, misi, dan tujuan institusi dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dedikasi dalam menuntaskan setiap temuan pelanggaran hingga diterbitkannya Surat Penetapan Denda Administratif mencerminkan kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

- **Adaptif**

Menghadapi dinamika regulasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi, petugas terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Pemanfaatan sistem digital dalam administrasi dan pelaporan denda merupakan wujud kemampuan beradaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sanksi.

- **Kolaboratif**

Penanganan sanksi denda administratif melibatkan kerja sama yang erat antara petugas lapangan, Pejabat Kuasa Pengelola PNBK, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini dibangun untuk memastikan kelancaran proses verifikasi, penetapan, dan penyelesaian denda, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara secara terintegrasi.

Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Target	Capaian
Balmon SFR Kelas I Jakarta	80%	93%
Balmon SFR Kelas I Bandung	80%	100%

Berdasarkan data pada tabel benchmark, Balai Monitor SFR Kelas I Bandung menunjukkan capaian kinerja yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dalam kegiatan pengenaan sanksi denda administratif. Dari target yang sama, yaitu 80% dari total temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penetapan Denda Administratif, Balmon SFR Kelas I Bandung Sberhasil merealisasikan sebesar 100% dari target, sementara Balmon SFR Kelas I Jakarta mencapai realisasi sebesar 93% dari target. Capaian kedua UPT tersebut tetap berada pada kategori sangat baik, dengan Balmon Bandung berhasil melampaui target secara sempurna dan Balmon Jakarta hanya terpaut 7% dari capaian maksimal.

Di wilayah Jakarta, dengan karakteristik pengguna yang lebih heterogen dan didominasi oleh penyelenggara telekomunikasi skala besar, proses pengenaan denda administratif seringkali diikuti dengan pengajuan keberatan atau klarifikasi yang memperpanjang waktu penyelesaian. Hal ini berdampak pada realisasi penetapan denda yang belum mencapai 100% dalam periode pelaporan, meskipun secara teknis seluruh temuan pelanggaran telah diproses. Sementara itu, di wilayah Bandung dengan skala pengguna yang lebih beragam namun tidak sepadat Jakarta, proses penetapan cenderung lebih cepat karena minimnya resistensi dari subjek denda.

Secara keseluruhan, capaian 93% Balmon Jakarta tetap merupakan kinerja yang sangat baik mengingat kompleksitas tantangan operasional di wilayah ibu kota. Selisih 7% dengan Balmon Bandung lebih mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah dan beban kerja, bukan indikasi penurunan kualitas penegakan hukum. Kedua UPT telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor PNPB melalui peneraan sanksi administratif yang tepat sasaran.

Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif di Kab/Kota Tahun 2025

IK-1.7 Persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan

Latar Belakang

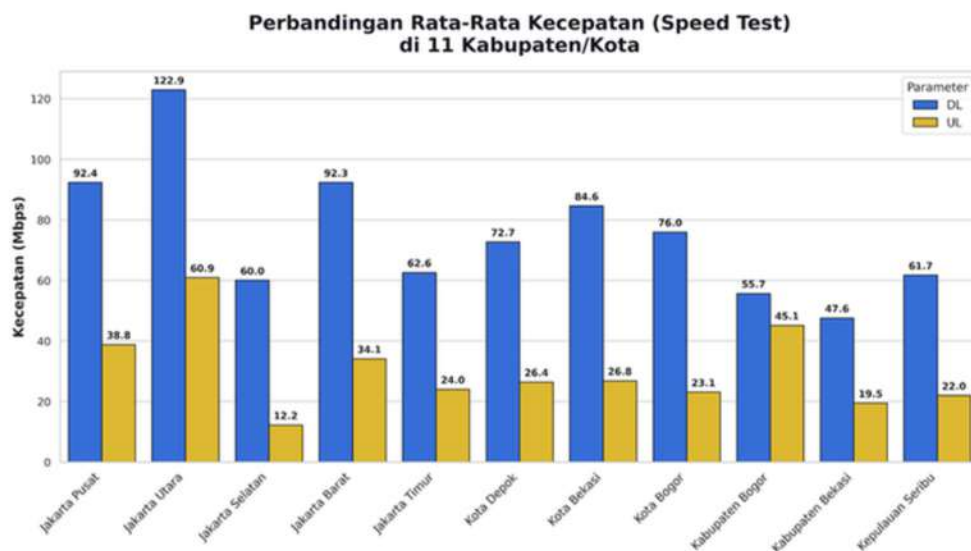
Dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan telekomunikasi yang berkualitas, andal, dan merata bagi masyarakat, diperlukan kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja jaringan telekomunikasi secara berkala dan terstruktur. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi, baik untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi, pemerintahan, maupun kegiatan ekonomi, kualitas layanan telekomunikasi menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung transformasi digital nasional. Pengukuran kualitas layanan dilakukan menggunakan perangkat berstandar internasional yang mengacu pada rekomendasi International Telecommunication Union (ITU), yang validitas dan akurasi telah diakui oleh seluruh operator seluler di Indonesia. Penggunaan perangkat yang terstandarisasi ini bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran bersifat objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengukuran dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu static test dan drive test. Metode static test dilakukan pada titik lokasi tertentu untuk memperoleh parameter kualitas jaringan secara spesifik, sedangkan drive test dilaksanakan dengan mobilitas di sepanjang rute tertentu guna memetakan performa jaringan secara menyeluruh pada suatu wilayah. Kedua metode ini saling melengkapi dalam menghasilkan gambaran kondisi layanan telekomunikasi secara komprehensif. Ruang lingkup lokasi pengukuran mencakup berbagai area strategis, antara lain kawasan permukiman, jalan protokol, pusat keramaian, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat transportasi, serta lokasi-lokasi lain yang memiliki tingkat aktivitas komunikasi tinggi. Pengukuran dilakukan terhadap layanan voice, SMS, dan data, sehingga evaluasi yang dihasilkan dapat menggambarkan kualitas layanan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dilakukan secara rutin dan insidental. Secara rutin, pengukuran dilaksanakan satu kali dalam satu bulan pada setiap kabupaten/kota sebagai bentuk monitoring berkelanjutan. Adapun pengukuran insidental dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat, laporan Pemerintah Daerah, hasil analisis aplikasi SIGMON, kondisi kebencanaan, serta dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan besar baik nasional maupun internasional.

Capaian kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta ditetapkan dengan target pelaksanaan monitoring pada 80% kabupaten/kota di wilayah kerja UPT. Dari 11 (sebelas) Kota/Kabupaten, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah melakukan pengukuran kualitas layanan di seluruh Kabupaten/Kota yang menjadikan perjanjian kinerja untuk kegiatan ini mencapai 100%, meskipun target untuk memenuhi Perjanjian Kinerja hanya diperlukan 9 (sembilan) Kota/Kabupaten agar tercapai target 80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital telah dilaksanakan melebihi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) UPT Tahun 2025.

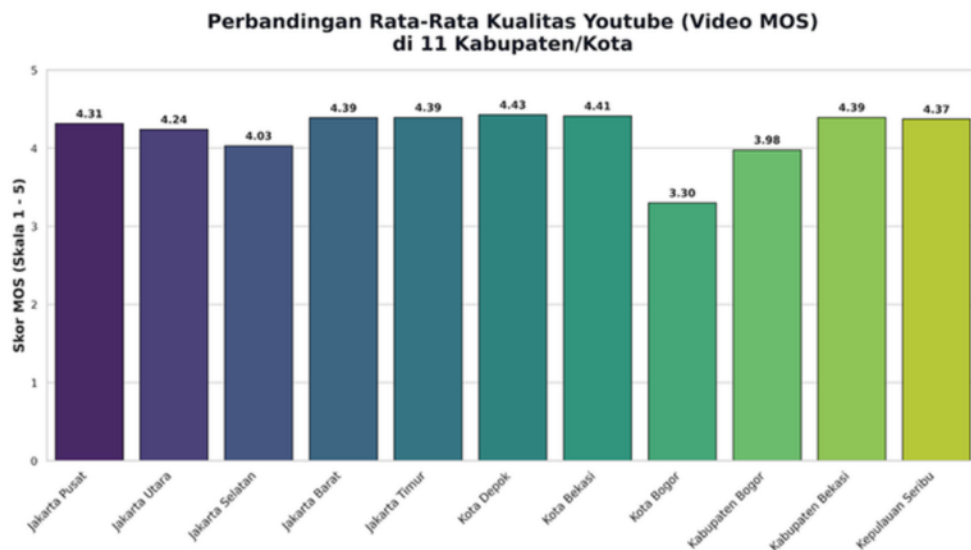
Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	80%	100%	100%

Sebagai bagian dari kegiatan pengawasan dan evaluasi kualitas layanan telekomunikasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah melaksanakan pengukuran kualitas layanan (Quality of Service/QoS) di wilayah kerja selama Tahun 2025. Pengukuran ini dilakukan pada beberapa kabupaten/kota di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk memperoleh gambaran mengenai performa layanan data yang diterima masyarakat. Parameter yang diukur meliputi kecepatan akses internet (download dan upload) melalui metode speed test serta kualitas layanan video streaming menggunakan indikator Video Mean Opinion Score (MOS) pada platform YouTube. Hasil rekapitulasi pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut, yang menunjukkan perbandingan rata-rata kinerja layanan pada masing-masing wilayah pengukuran.



Berdasarkan hasil rekapitulasi pengukuran rata-rata kecepatan internet pada 11 kabupaten/kota, terlihat adanya variasi performa layanan data baik pada parameter download (DL) maupun upload (UL). Kecepatan tertinggi tercatat di Jakarta Utara dengan download 122,9 Mbps dan upload 60,9 Mbps, diikuti Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang juga menunjukkan performa tinggi. Wilayah penyangga seperti Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok memiliki performa jaringan pada kategori menengah namun masih cukup stabil. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan dan Kabupaten Bekasi menunjukkan kecepatan yang relatif lebih rendah.

Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa wilayah pusat kota cenderung memiliki kecepatan internet lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten atau daerah pinggiran, yang dipengaruhi oleh faktor infrastruktur jaringan, kapasitas layanan, dan kepadatan pengguna.



Berdasarkan hasil rekapitulasi pengukuran kualitas layanan video streaming YouTube menggunakan parameter Video Mean Opinion Score (MOS) pada 11 kabupaten/kota, secara umum kualitas layanan berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan nilai berkisar antara 3,30 hingga 4,43 pada skala 1–5. Nilai MOS tertinggi tercatat di Kota Depok sebesar 4,43, diikuti Kota Bekasi sebesar 4,41, serta Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bekasi masing-masing sebesar 4,39. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Selatan juga menunjukkan kualitas layanan yang baik dengan nilai di atas 4,0. Adapun nilai terendah terdapat di Kota Bogor sebesar 3,30 dan Kabupaten Bogor sebesar 3,98, namun masih berada pada kategori kualitas layanan yang cukup baik untuk aktivitas streaming video. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa layanan data di wilayah pengukuran pada umumnya telah mampu mendukung pengalaman pengguna yang relatif baik dalam mengakses layanan video streaming.

Faktor Kendala/Hambatan dalam Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital pada Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kondisi geografis dan kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan yang dapat mempengaruhi kelancaran mobilitas tim pengukuran saat melakukan monitoring di beberapa lokasi pengukuran. Selain itu, variasi kondisi jaringan pada waktu pengukuran, seperti fluktuasi trafik pengguna jaringan telekomunikasi, juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran kualitas layanan yang diperoleh di lapangan. Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang harus disesuaikan dengan agenda kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio lainnya sehingga memerlukan pengaturan jadwal yang lebih optimal.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring pada seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kualitas layanan di berbagai wilayah, memetakan area yang memerlukan peningkatan kualitas jaringan, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kepada penyelenggara telekomunikasi. Dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya basis data yang komprehensif dan terukur mengenai kondisi kualitas layanan infrastruktur digital di wilayah kerja UPT, yang dapat mendukung pengambilan kebijakan, perencanaan kegiatan pengawasan berikutnya, serta peningkatan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

Inovasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta melakukan optimalisasi metode monitoring melalui pemanfaatan perangkat pengukuran berbasis aplikasi serta pengolahan data secara digital yang memungkinkan proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, pelaksanaan monitoring juga diintegrasikan dengan kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio lainnya yang dilakukan oleh UPT, sehingga cakupan wilayah pengukuran dapat diperluas tanpa menambah beban sumber daya secara signifikan. Pendekatan ini merupakan bentuk inovasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring yang mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan data sekaligus mendukung peningkatan kualitas pengolahan dan pelaporan hasil pengukuran.

Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Capaian indikator kinerja pada kegiatan ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah pelaksanaan monitoring pada 80% kabupaten/kota di wilayah kerja UPT atau setara dengan 9 kabupaten/kota dari total 11 wilayah. Namun hingga akhir Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berhasil melaksanakan pengukuran kualitas layanan pada seluruh 11 kabupaten/kota sehingga realisasi capaian mencapai 100%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang terstruktur, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan monitoring di lapangan. Dengan demikian, indikator kinerja kegiatan ini tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

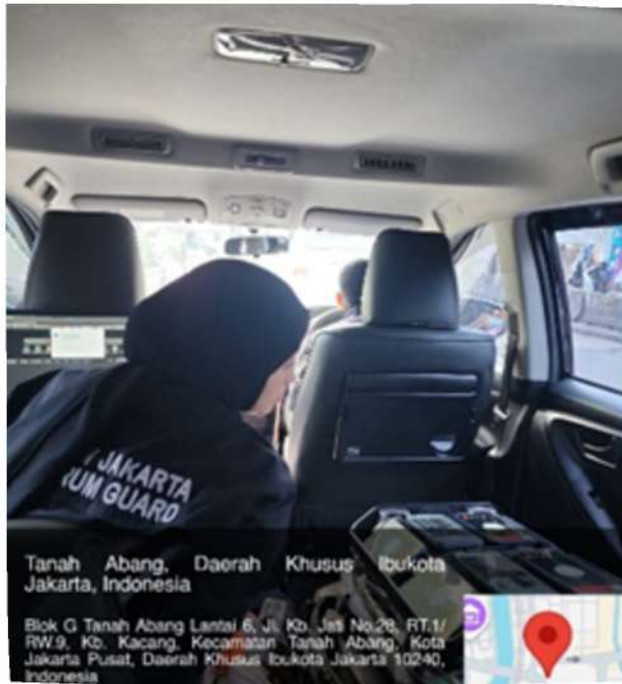
Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan perangkat pengukuran yang tersedia serta mengintegrasikan pelaksanaan pengukuran dengan kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio lainnya di wilayah kerja UPT. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan pengukuran kualitas layanan dilaksanakan secara bersamaan dalam satu rangkaian kegiatan lapangan sehingga dapat memperluas cakupan wilayah monitoring hingga seluruh kabupaten/kota tanpa memerlukan tambahan biaya operasional yang signifikan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dalam kegiatan ini dapat dikatakan efektif dan efisien serta mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlaq

Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan evaluasi kualitas layanan telekomunikasi mencerminkan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK secara komprehensif dalam mendukung transformasi digital nasional. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui komitmen memastikan layanan voice, SMS, dan data yang berkualitas, andal, dan merata di berbagai area strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, baik secara rutin maupun insidental berdasarkan aduan dan kebutuhan khusus. Akuntabilitas dan Kompetensi tercermin dari penggunaan perangkat berstandar internasional yang mengacu pada rekomendasi International Telecommunication Union (ITU), serta penerapan metode static test dan drive test yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap Adaptif dan Kolaboratif terlihat dari respons cepat terhadap laporan masyarakat, hasil analisis SIGMON, kondisi kebencanaan, serta dukungan pada kegiatan nasional maupun internasional, yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Konsistensi pelaksanaan monitoring berkala di setiap kabupaten/kota juga mencerminkan Loyalitas terhadap kebijakan pemerintah dan penguatan tata kelola sektor telekomunikasi, sehingga kegiatan ini tidak hanya menjaga kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan negara di bidang komunikasi.

Dokumentasi Kegiatan



IK-1.8 Persentase (%) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)

Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang pemanfaatannya harus diatur dan dikelola secara tertib agar tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan komunikasi lainnya. Penggunaan perangkat radio tanpa pemahaman teknis dan tanpa sertifikasi operator berpotensi menimbulkan interferensi frekuensi, gangguan komunikasi, bahkan membahayakan keselamatan pada sektor tertentu seperti pelayaran dan penerbangan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan layanan sertifikasi operator radio guna memastikan bahwa setiap pengguna radio memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan perangkat radio sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk layanan tersebut adalah Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menjadi operator radio amatir. Melalui UNAR, peserta diuji pemahaman mengenai regulasi, teknik radio, prosedur komunikasi, serta etika penggunaan frekuensi sebelum diberikan izin amatir radio untuk mengoperasikan stasiun radio amatir.

Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program Maritime On The Spot (MOTS) – Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) yang bertujuan memberikan kemudahan layanan perizinan serta sertifikasi operator radio bagi nelayan dan awak kapal. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan perangkat radio maritim secara benar, sekaligus mendorong penggunaan perangkat komunikasi yang sesuai standar guna mendukung keselamatan pelayaran dan komunikasi darurat di laut.

Program MOTS juga dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya penggunaan perangkat radio yang tidak sesuai dengan alokasi frekuensi sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap layanan lain, termasuk komunikasi penerbangan. Melalui sertifikasi operator radio dan penerbitan izin komunikasi radio bagi nelayan, pemerintah berupaya menciptakan ketertiban penggunaan frekuensi radio, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta memperkuat tata kelola komunikasi radio maritim di Indonesia.

Dengan demikian, penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio seperti UNAR maupun MOTS-IKLAN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi radio, memastikan kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi radio, serta mendukung keselamatan dan kelancaran komunikasi radio di berbagai sektor.

Capaian kinerja

Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN) ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 100% atau sebanyak 6 (enam) kali penyelenggaraan UNAR dan 1 (satu) kali penyelenggaraan Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN. Dengan rincian capaian target seperti pada tabel berikut:

Kegiatan	Target	Capaian	Persentase Capaian	Jumlah Peserta
UNAR	6	14	100%	504
Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN	1	1	100%	73

Pada Tahun Anggaran 2025 Balmon SFR Kelas I Jakarta telah merealisasikan penyelenggaraan UNAR sesuai target yang direncanakan. Penyelenggaraan UNAR dibedakan menjadi UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler. Kegiatan UNAR Reguler dilaksanakan di kantor Balmon SFR Kelas I Jakarta dengan sistem CAT sebanyak 1 kali kegiatan setiap bulan atau 12 kali kegiatan dalam setahun. Selanjutnya untuk kegiatan UNAR Non Reguler dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dalam setahun.

Berikut rekapitulasi data penyelenggaraan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta Tahun 2024:

TANGGAL	PERIODE	JUMLAH PESERTA				JUMLAH KELULUSAN		
		SIAGA	PENGGALANG	PENEGAK	TOTAL	LULUS	TIDAK LULUS	PERSENTASE KELULUSAN
UNAR REGULER								
18/01/2024	CAT I	22	3	2	27	20	7	74 %
15/02/2024	CAT II	38	2	5	45	30	15	67 %
21/03/2024	CAT III	37	4	2	43	36	7	84 %
23/04/2024	CAT IV	23	0	2	25	18	7	72 %
15/05/2024	CAT V	29	7	7	43	27	16	63 %
12/06/2024	CAT VI	14	1	0	15	8	7	53 %
10/07/2024	CAT VII	34	2	3	39	28	11	72 %
14/08/2024	CAT VIII	26	4	1	31	21	10	68 %
11/09/2024	CAT IX	25	6	6	37	23	14	62 %
16/10/2024	CAT X	21	3	2	26	22	4	85 %
13/11/2024	CAT XI	34	3	3	40	30	10	75 %
11/12/2024	CAT XII	24	3	0	27	20	7	74 %
UNAR NON REGULER								
04/05/2024	CAT I	55	13	6	74	64	10	86 %
31/08/2024	CAT II	32	0	0	32	18	14	56 %
JUMLAH TOTAL		414	51	39	504	365	139*	72.42 %

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika maka terhitung sejak tanggal 18 November 2023 tarif PNBP untuk REOR, IAR, dan IKRAP dihilangkan atau berlaku Rp 0,- (nol rupiah).

Sedangkan untuk capaian untuk penyelenggaraan Sertifikasi SRC/LRC IKRAN pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2025 di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 73 peserta. Bimbingan teknis yang diberikan yaitu berupa penyampaian regulasi dan aturan penggunaan komunikasi radio, tata cara komunikasi marabahaya dan praktek menggunakan perangkat radio.

Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir

Tahun	UNAR		MOTS-IKLAN			
	Jumlah Penerima Layanan	Persentase Capaian	Jumlah Sertifikat			Persentase Capaian
			SRC	LRC	IKLAN	
2021	771	100 %	99	-	-	100 %
2022	695	100 %	100	106	33	100 %
2023	340	91,47 %	-	50	50	100 %
2024	590	100 %	-	114	64	100 %
2025	504	100 %	-	73	73	100 %
TOTAL	2768		199	343	220	100%

Berdasarkan capaian kinerja selama periode 2021–2025, penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dalam memenuhi target pelayanan kepada masyarakat. Layanan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) telah memberikan layanan kepada sebanyak 2.768 peserta, sedangkan pada layanan Sertifikasi Operator Radio Maritim dan Perikanan (SRC/LRC IKLAN) telah memberikan bimbingan teknis dengan hasil 762 sertifikat. Secara umum, persentase capaian kinerja pada kedua layanan tersebut mencapai 100% setiap tahunnya, dengan satu pengecualian pada layanan UNAR tahun 2023 yang mencapai 91,47% karena penurunan tren peminat amatir radio. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio telah berjalan secara efektif serta mampu mendukung peningkatan kompetensi operator radio dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di masyarakat.

Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah benchmarking capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN) pada tahun anggaran 2025 sebagaimana berikut:

Tabel Benchmarking Capaian Penyelenggaraan UNAR

Nama UPT	Target Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta	Capaian Kinerja
UPT Jakarta	6	14	504	100 %
UPT Bandung	6	13	435	100 %

Tabel Benchmarking Capaian Penyelenggaraan MOTS-IKLAN

Nama UPT	Target Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Sertifikat		Capaian Kinerja
			LRC	IKLAN	
UPT Jakarta	1	1	73	73	100 %
UPT Bandung	1	2	25	25	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa UPT Jakarta dan UPT Bandung sama-sama dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Target kinerja layanan sertifikasi operator radio dapat tercapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien. Perencanaan kegiatan yang baik, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta koordinasi yang optimal antara unit pelaksana dan pemangku kepentingan turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, seluruh rangkaian layanan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan terselenggaranya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) menambah jumlah pegiat amatir radio yang memiliki Izin Amatir Radio (IAR) sesuai dengan tingkat kecakapannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukannya. Disisi lain juga meningkatkan sinergitas antara Kementerian Komunikasi dan Digital selaku regulator dengan ORARI selaku stakeholder atau organisasi yang menaungi para amatir radio di Indonesia.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan nelayan dapat menjadi terampil dalam mengoperasikan stasiun radio serta dapat melakukan komunikasi yang bersifat marabahaya dan umum (non marabahaya) menggunakan kanal komunikasi yang tepat sesuai peruntukannya.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Terkait penyelenggaraan UNAR kami mengarahkan peserta ujian UNAR yang lulus untuk segera berkoordinasi dengan organisasi amatir lokal sesuai dengan identitas alamat KTP terkait pendaftaran keanggotaan IAR yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Kemudian mengarahkan peserta yang tidak lulus untuk lebih giat mempelajari materi ujian amatir radio melalui aplikasi SeeNow dan berkoordinasi dengan pengurus ORARI lokal untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut.

Terkait penyelenggaraan MOTS-IKRAN kami merencanakan program kerja pada tahun anggaran berikutnya sebagai inovasi atau peningkatan kualitas pelayanan terkait Bimbingan Teknis SRC/LRC kepada para nelayan atau awak kapal dengan menjangkau lebih banyak nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Muara Baru dan Muara Angke.

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna perangkat komunikasi radio dan sektor yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai sarana komunikasi.

Melalui proses sertifikasi, masyarakat yang mengoperasikan perangkat radio memperoleh pengetahuan mengenai teknik komunikasi radio, regulasi penggunaan frekuensi, serta etika berkomunikasi di udara. Hal ini membuat operator radio lebih memahami cara penggunaan perangkat radio yang benar dan sesuai ketentuan. Dengan adanya operator yang tersertifikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio dapat berlangsung lebih tertib dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini membantu mengurangi potensi gangguan (interferensi) antar pengguna frekuensi radio.

Melalui UNAR, masyarakat yang memiliki minat pada kegiatan amatir radio dapat memperoleh legalitas untuk beraktivitas secara resmi. Hal ini mendorong berkembangnya komunitas amatir radio yang juga sering berperan dalam kegiatan sosial, komunikasi darurat bencana, dan dukungan komunikasi pada berbagai kegiatan masyarakat.

Pada sektor maritim dan perikanan, sertifikasi operator radio melalui program MOTS-IKRAN membantu meningkatkan kemampuan nelayan atau awak kapal dalam menggunakan radio komunikasi untuk koordinasi operasional, penyampaian informasi penting, serta komunikasi darurat di laut, sehingga dapat mendukung aspek keselamatan pelayaran.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) pada tahun anggaran 2025 di Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan karena beberapa hal berikut:

- Lebih intens dalam hal koordinasi dengan ORARI lokal dan daerah terkait dengan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan UNAR.
- Selalu mengarahkan peserta untuk mempelajari materi dan simulasi Try Out UNAR melalui aplikasi SeeNow sebelum pelaksanaan Ujian.
- Memberikan layanan konsultasi daring loket pelayanan melalui Aplikasi Whatsapp sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengurus perizinan IAR dan IKRAP.
- Melakukan Asistensi pendaftaran peserta UNAR.
- Menambah kegiatan UNAR Non Reguler dari yang semula hanya direncanakan 1 (satu) kali kegiatan menjadi 2 (dua) kali kegiatan berdasarkan permohonan penyelenggaraan UNAR Non Reguler yang diusulkan oleh ORARI Lokal Kota Bekasi.
- Melakukan koordinasi intens dengan pihak PPSNZJ dan KSOP IV Muara Angke terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis
- Melakukan persiapan secara matang sebelum kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan
- Bekerjasama dengan pihak kesyahbandaran untuk menjadi narasumber bimbingan teknis.
- Melakukan publikasi informasi kepada para pemilik kapal agar para awak kapalnya dapat mengikuti Bimbingan Teknis SRC/LRC
- Melakukan asistensi pendaftaran Sertifikasi Operator Radio (SOR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN).

Efisiensi

Dengan penyelenggaraan UNAR reguler berbasis CAT yang dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang aula, koneksi internet, dan perangkat laptop milik kantor Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta, telah menghemat biaya sewa sarana dan prasarana.

Penyelenggaraan Bimtek SRC/LRC kepada nelayan diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di ruang Aula Kantor Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru sehingga tidak membutuhkan biaya sewa gedung. Narasumber/Pemateri Bimtek SRC/LRC juga berasal dari internal Ditjen Infrastruktur Digital, sehingga tidak dibutuhkan biaya honor narasumber.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlak

Dalam Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) ini, Balmon SFR Kelas I Jakarta telah menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang mengikuti proses perizinan Amatir Radio dengan mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR);
- Melaksanakan koordinasi dengan organisasi terkait (ORARI dan RAPI) dalam rangka pembinaan dan kerjasama mewujudkan tertib perizinan dan penggunaan frekuensi amatir radio sesuai peraturan.
- Melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan UNAR sebagai upaya melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Akuntabel

- Pengawas ujian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pengawas untuk kepentingan pribadi.

Kompeten

- Pengawas ujian harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat mengantisipasi tindak kecurangan oleh peserta.
- Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan UNAR berbasis CAT.

Harmonis

- Menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya, karena peserta Ujian Negara Amatir berasal dari beragam profesi, usia dan pendidikan yang telah ditempuh.
- Kerjasama dan kekompakan panitia pelaksana UNAR selama kegiatan berlangsung.

- Loyal
- Sebagai penyelenggara UNAR selalu berusaha untuk menjaga nama baik Instansi dan Negara.
- Memegang teguh Pakta integritas dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.

Adaptif

- Perubahan pelayanan terkait alur perpanjangan Izin Amatir Radio harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
- Penyelenggara UNAR selalu mengarahkan calon peserta untuk mempersiapkan diri dengan melakukan TryOut mandiri menggunakan aplikasi SeeNow

Kolaboratif

- Membangun hubungan kerja yang sinergis dengan ORARI lokal.

Dokumentasi Kegiatan

IK-1.9 Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio

Latar Belakang

Program kegiatan pelayanan penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio adalah dalam rangka mencegah keterlambatan pembayaran oleh Wajib Bayar/ Penanggung Hutang dan untuk mencegah/ meminimalisir adanya Piutang Negara dari PNPB atas tagihan BHP frekuensi radio. Untuk kegiatan penanganan Tagihan BHP frekuensi radio dilaksanakan dengan melakukan monitor status pembayaran melalui aplikasi Billing-ISR yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi dan mengunjungi Wajib Bayar ke lokasi alamat terdaftar untuk melakukan klarifikasi langsung terkait kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio yang belum diselesaikan/ dilunasi sehingga melewati batas jatuh tempo pembayaran serta untuk memastikan kesesuaian data dilapangan dengan database SIMS wilayah kerja UPT Jakarta.

Kegiatan penanganan Piutang BHP frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bahwa Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) per penanggung Hutang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan maka tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Menindaklanjuti ketentuan peraturan baru tersebut di atas, kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan penanganan Piutang BHP frekuensi radio di atas nilai 8 (Delapan) juta rupiah dan di bawah nilai 8 (Delapan) juta rupiah. Pelayanan penanganan Piutang yang dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN dilaksanakan dengan kegiatan pendampingan KPKNL untuk penanganan pelimpahan Piutang yang sudah pada tahap penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Hutang langsung ke lokasi alamat yang terdaftar untuk penyelesaian kewajiban pembayaran.

Capaian kinerja

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%)	80%	100%	100%
	Pelaksanaan			
	Penanganan			
	Piutang BHP Frekuensi Radio			

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio telah terealisasi 100% sesuai target capaian yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya capaian tersebut memiliki 2 (dua) indikator penilaian yaitu Penanganan Pencegahan dan Pengurangan Piutang dan Koordinasi Penanganan Piutang (Dengan KPKNL atau Pengumpulan Dokumen Penghapusan Mutlak dan PPNTD). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Capaian Penanganan Pencegahan dan Pengurangan Piutang:

$$\frac{(\text{Jumlah Piutang Dihubungi})}{(\text{Jumlah Target Piutang})} \times 100\%$$

Data target piutang merupakan data tagihan yang berasal dari Aplikasi Billing-ISR yang diunduh pada bulan berjalan dan dilaporkan setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan UPT. Capaian setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Piutang Dihubungi	Jumlah Target Piutang	Capaian
Januari	1479	1479	100%
Februari	1188	1188	100%
Maret	1282	1282	100%
April	1248	1248	100%
Mei	2225	2225	100%
Juni	1460	1460	100%
Juli	1300	1300	100%
Agustus	576	576	100%
September	687	687	100%
Oktober	965	965	100%
November	885	885	100%
Desember	631	631	100%
TOTAL	13926	13926	100%

Sementara Capaian Koordinasi Penanganan Piutang dinilai 100% apabila terdapat kegiatan koordinasi penanganan piutang (dengan KPKNL atau Pengumpulan Dokumen Penghapusan Mutlak dan PPNTD) minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan telah tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Kegiatan Koordinasi Penanganan Piutang	Capaian
Triwulan-1	1. Koordinasi Update Status Pelimpahan Piutang ke KPKNL Bekasi dan Bogor 2. Melakukan penjadwalan penelitian lapangan bersama KPKNL Bogor terhadap target di wilayah Bogor 3. Penerbitan Surat PSBDT oleh KPKNL Bekasi tentang penanggung utang a.n CV Berkah	100%
Triwulan-2	1. Melaksanakan Pendampingan dengan KPKNL Bogor terhadap target di wilayah Bogor dan ke Kantor Kelurahan setempat 2. Koordinasi hasil pendampingan penelitian lapangan dengan KPKNL Bogor 3. Penyampaian Dokumen Berita Acara dan Surat Keterangan dari Kelurahan 4. Koordinasi hasil kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang	100%
Triwulan-3	1. Koordinasi dengan KPKNL Bogor terkait tindak lanjut pelimpahan piutang dan penjelasan status PSBDT 2. Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan PPNTD	100%
Triwulan-4	Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan PPNTD	100%

Tercapainya target penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio memberikan dampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi dan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada negara. Melalui penanganan piutang yang efektif, pemerintah dapat meminimalkan potensi tunggakan serta meningkatkan kesadaran para pemegang izin stasiun radio untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Selain itu, keberhasilan penanganan piutang juga berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor spektrum frekuensi radio serta mendukung pengelolaan sumber daya frekuensi yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Capaian 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah rekapitulasi capaian target kinerja Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio pada periode 5 tahun terakhir (2021 – 2025):

Tahun	Distribusi SPP BHP			Koordinasi Piutang			Capaian Total
	Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase	
2021	3334	3334	100%	4	4	100%	100%
2022	2614	2614	100%	4	4	100%	100%
2023	1440	3431	100%	4	4	100%	100%
2024	1134	1134	100%	4	4	100%	100%
2025	13926	13926	100%	4	4	100%	100%

Berdasarkan data capaian kinerja penanganan piutang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama periode 2021–2025, seluruh target kegiatan yang meliputi distribusi Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio dan pelaksanaan koordinasi penanganan piutang berhasil direalisasikan secara optimal. Setiap tahun, target distribusi SPP BHP dapat tercapai bahkan pada tahun 2023 realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan koordinasi penanganan piutang yang ditargetkan sebanyak 4 kali setiap tahun juga terlaksana seluruhnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanganan piutang pada periode lima tahun terakhir menunjukkan persentase capaian sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanganan piutang telah berjalan secara efektif dan konsisten dalam mendukung tertib administrasi serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.

Benchmarking dengan UPT Lain

Berikut adalah benchmarking capaian target penanganan piutang BHP frekuensi radio dengan UPT lain pada tahun anggaran 2025:

Tahun	Distribusi SPP BHP	Koordinasi Piutang	Jumlah Kab/Kota	Capaian Total
UPT Jakarta	100%	100%	11 Kab/Kota	100%
UPT Bandung	100%	100%	27 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa baik Balmon Jakarta maupun Balmon Bandung dapat mencapai target kinerja penanganan piutang BHP frekuensi radio pada tahun 2025. Namun dari perbedaan jumlah kabupaten/kota wilayah layanan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi UPT Bandung dalam proses penanganan piutang BHP Frekuensi Radio dan koordinasi dengan KPNL setempat. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi UPT Jakarta dalam melanjutkan capaian target kinerja yang sudah direncanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Tindak Lanjut dan Dampak yang dihasilkan

Melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan penanganan tagihan dan pencegahan piutang BHP Frekuensi Radio untuk terus melakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya terutama dengan lebih mengoptimalkan distribusi SPP BHP Frekuensi Radio melalui email kepada para Wajib Bayar/Penanggung Piutang.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Dalam mencapai target kinerja Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan monitor status tagihan pembayaran BHP melalui Aplikasi Billing-ISR (<https://billing-isr.kominfo.go.id>), dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Menghubungi klien melalui nomor telepon dan/atau email yang terdaftar khususnya untuk tagihan pembayaran BHP yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran.
3. Melakukan kunjungan dan klarifikasi terhadap wajib bayar ke lokasi alamat terdaftar khususnya untuk status tagihan keterlambatan.
4. Membantu klien yang mengalami kendala dalam akun MySpectra untuk mengunduh tagihan pembayaran (invoice) maupun cara menggunakan fitur menu aplikasi secara langsung pada saat kegiatan di lokasi alamat.
5. Mengarahkan klien untuk menghubungi loket pelayanan terpadu Ditjen Infrastruktur Digital melalui telepon atau surat apabila terkendala dalam hal pengurusan perizinan spektrum frekuensi radio baik terkait pembuatan/modifikasi akun dan pembuatan/modifikasi ISR.

Efisiensi

Implementasi pelayanan perizinan secara online khususnya terkait pendistribusian rincian tagihan tidak lagi dikirimkan melalui jasa pengiriman sehingga menghemat biaya anggaran pengiriman surat SPP BHP Frekuensi Radio.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlak

Dalam penyelenggaraan kegiatan Penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak (BHP) kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
- Memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan mengunduh invoice karena masih terkendala dalam mengakses Aplikasi Billing-ISR.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemohon izin.
- Melakukan evaluasi kegiatan Penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak (BHP) untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

Harmonis

- Petugas pelayanan mampu melayani pemohon izin dengan ramah dan tenang dalam menyampaikan penjelasan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki pemohon izin.

Loyal

- Taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses perizinan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan dan secara rutin melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.

Adaptif

- Petugas pelayanan tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait peraturan dan alur proses perizinan yang terjadi sewaktu – waktu;
- Berkontribusi dalam perbaikan pelayanan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi dalam peraturan maupun proses perizinan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah dipahami.

Kolaboratif

- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak/instansi terkait untuk mendorong kesadaran wajib bayar untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo pembayaran.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlaq



IK-1.10 Persentase (%) sosialisasi pelayanan publik

Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman yang baik dari para pengguna frekuensi radio mengenai ketentuan perizinan, tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai regulasi, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang izin. Namun demikian, masih terdapat masyarakat maupun pengguna frekuensi radio yang belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait perizinan spektrum frekuensi radio, termasuk konsekuensi hukum berupa sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai regulasi perizinan spektrum frekuensi radio, mekanisme pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta layanan asistensi dan konsultasi perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dan para pengguna frekuensi radio dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban dan prosedur perizinan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan potensi pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%

Pada Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan target pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik yaitu sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan dengan target peserta sosialisasi sebanyak 30 (tiga puluh) peserta dan telah tercapai sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan dengan dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) peserta.

Pada Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan target pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik yaitu sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan dengan target peserta sosialisasi sebanyak 30 (tiga puluh) peserta dan telah tercapai sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan dengan dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) peserta.

Meskipun pada tahun berjalan terjadi efisiensi anggaran yang berdampak pada tidak tersedianya alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tetap berupaya mempertahankan capaian kinerja pada aspek peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi penggunaan frekuensi radio. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi kerja sama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta komunitas yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan perangkat dan teknologi radio.

Salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut adalah partisipasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Indonesia Homebrewers Club. Melalui kegiatan tersebut, Balai Monitor memanfaatkan momentum pertemuan komunitas untuk menyampaikan materi sosialisasi terkait regulasi perizinan spektrum frekuensi radio, ketentuan penggunaan perangkat radio, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk tetap menjangkau masyarakat pengguna frekuensi radio meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama komunitas serta pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi frekuensi radio tetap dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dalam peningkatan pemahaman publik terhadap regulasi spektrum frekuensi radio tetap dapat dipertahankan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia serta penguatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

Capaian 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah data capaian target kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik pada periode 5 tahun terakhir (2021–2025):

Tahun	Target Capaian	Capaian Target	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah Peserta
2021	80%	91%	1 kali	50
2022	100%	100%	1 kali	100
2023	100%	100%	2 kali	87
2024	100%	100%	2 kali	100
2025	100%	100%	1 kali	41

Berdasarkan data capaian kinerja kegiatan sosialisasi pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama periode lima tahun terakhir (2021–2025), secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pada tahun 2021, target capaian sebesar 80% berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 91% melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 50 peserta. Pada tahun 2022, kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 100 orang dan berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%.

Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024, kegiatan sosialisasi masing-masing dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 87 orang dan 100 orang, serta mampu mempertahankan capaian target kinerja sebesar 100%. Sementara itu pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 41 orang dan tetap mencapai target kinerja sebesar 100%. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berjalan secara optimal dan konsisten dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah benchmarking capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun anggaran 2025 sebagaimana berikut:

Tabel Benchmarking Capaian Penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan Publik

Nama UPT	Target Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta	Capaian Kinerja
UPT Jakarta	1	1	41	100 %
UPT Tangerang	1	1	100	100 %

Dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta sinergi dengan berbagai pihak, baik Balmon Jakarta maupun Balmon Tangerang mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi secara efektif sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Capaian ini menunjukkan komitmen kedua UPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, serta mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing.

Capaian 5 Tahun Terakhir

Terlaksananya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pengguna frekuensi radio terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait ketentuan perizinan spektrum frekuensi radio, tata cara penggunaan perangkat radio, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di bidang spektrum frekuensi radio juga semakin meningkat sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran maupun gangguan frekuensi radio. Selain itu, kegiatan ini turut mendorong pemanfaatan layanan asistensi dan konsultasi perizinan oleh masyarakat serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Kedepannya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta akan terus konsisten melaksanakan pelayanan perizinan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memastikan setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan secara legal dan tertib. Di samping itu, akan dilakukan secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas, baik melalui media sosial maupun melalui pertemuan langsung, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan penggunaan frekuensi radio serta konsekuensi sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Dalam mencapai target kinerja berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan:

1. Merencanakan kegiatan dengan berdasarkan tema kegiatan dengan konsep penyusunan yang baik;
2. Menyiapkan narasumber terkait sesuai dengan tema kegiatan;
3. Menentukan target peserta undangan kegiatan sosialisasi sesuai dengan tema kegiatan;
4. Menyusun tim kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan tugas dalam kegiatan;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana pada kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan;

Efisiensi

Pada tahun anggaran 2025 ini dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan maka kegiatan terkait sosialisasi pelayanan dilakukan tanpa biaya baik dari perjalanan dinas maupun sewa lokasi.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlak

Dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
- Memberikan pelayanan yang baik kepada peserta yang menghadiri kegiatan Sosialisasi.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala-kendala selama kegiatan berlangsung.
- Melakukan evaluasi kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio Kepada Masyarakat untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

Harmonis

- Narasumber mampu memberikan materi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan peserta dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.

Loyal

- Taat dan tertib dalam menjalankan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan susunan acara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Adaptif

- Panitia tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait kegiatan yang dapat terjadi sewaktu – waktu;
- Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami.

Kolaboratif

- Panitia berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mensukseskan kegiatan Sosialisasi.

Dokumentasi Kegiatan



IK-1.11 Persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP)

Latar Belakang

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM atau Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan/IPKP) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dituntut untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Survei Kepuasan Pelayanan Publik menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kinerja pelayanan publik melalui pengumpulan umpan balik secara langsung dari masyarakat. Hasil survei tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang telah diberikan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pelaksanaan survei ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya Survei Kepuasan Pelayanan Publik, diharapkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat memperoleh masukan yang objektif dari masyarakat sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kualitas pelayanan publik agar semakin responsif, efektif, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Capaian kinerja

Survei Kepuasan Masyarakat sudah terlaksana dengan capaian target 100% yang diikuti oleh 302 responden dan capaian IKM 3.92 (Sangat Baik) dengan detail hasil seperti yang dapat terlihat pada tabel dan infografis profil responden berikut:

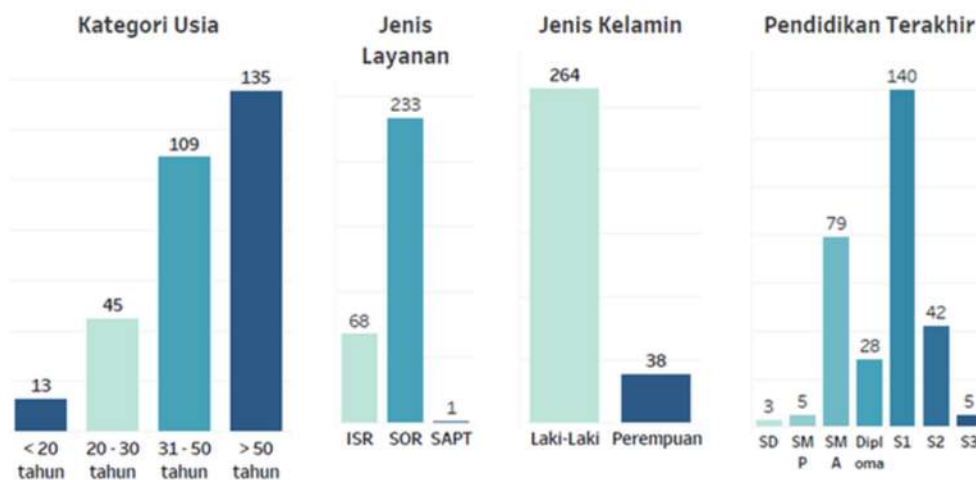
Indeks Survei		Kategori	Indeks
IKM	3.92	Biaya/tarif	3.88
		Kompetensi Pelaksana	3.95
		Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.92
IPKP	3.92	Perilaku Pelaksana	3.96
		Persyaratan	3.94
		Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.91
		Sarana dan Prasarana	3.91
		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.91
		Waktu Penyelesaian	3.88

Capaian tersebut di atas menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Beberapa unsur pelayanan memperoleh nilai yang cukup tinggi, di antaranya perilaku pelaksana dengan nilai 3.96, diikuti oleh unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 3.95, diikuti unsur persyaratan dengan nilai 3.94, serta unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan memperoleh nilai 3.92.

Sementara itu, kemudian produk spesifikasi jenis pelayanan, dan sistem, mekanisme, serta prosedur unsur sarana dan prasarana yang masing-masing memperoleh nilai 3.91, biaya/tarif sebesar 3.88, serta waktu penyelesaian sebesar 3.88.

Selain itu, hasil pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) juga menunjukkan capaian yang baik dengan nilai 3,92. Nilai tersebut mencerminkan bahwa secara keseluruhan masyarakat menilai kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Capaian ini menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah dilaksanakan secara optimal, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan agar dapat memberikan layanan yang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Profil Responden Survei



Capaian 4 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Survei Pelayanan Publik Balmon Jakarta baru ditargetkan sejak tahun anggaran 2022, berikut adalah rekapitulasi capaian target dalam periode 4 tahun terakhir:

Tahun	IKM/IPKP		Persentase
	Target	Capaian	
2022	3.20	3.60	100%
2023	3.20	3.85	100%
2024	3.20	3.85	100%
2025	3.20	3.92	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Balmon Jakarta mendapatkan penilaian indeks kepuasan masyarakat yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan telah dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang didapatkan.

Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	IKM/IPKP		Persentase
	Target	Capaian	
UPT Jakarta	3.20	3.92	100%
UPT Tangerang	3.20	3.89	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik UPT Jakarta maupun UPT Tangerang dapat mencapai target kinerjanya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kedua UPT tersebut dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terkait standar pelayanan yang diberikan sehingga mendapatkan penilaian Sangat Baik. Kedepannya masing-masing UPT perlu melanjutkan kinerja baiknya dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan dengan menerapkan inovasi-inovasi baru yang lebih berdampak dalam memberikan pelayanan.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah mampu memenuhi harapan pengguna layanan, baik dari aspek kompetensi petugas, kejelasan prosedur, kemudahan persyaratan, maupun kualitas sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, tingginya tingkat kepuasan masyarakat juga menunjukkan adanya kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadap kinerja Balai Monitor dalam memberikan layanan di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Di sisi lain, capaian tersebut turut mendorong peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat menjadikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik sekaligus melakukan perbaikan pada aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, tercapainya target IKM tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kinerja pelayanan, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Inovasi, Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dilakukan dengan upaya-upaya berikut:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan melalui Diklat Pelayanan Prima
- Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- Melakukan monitoring progress pelayanan terhadap masyarakat hingga selesai.
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diinisiasi oleh Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam pembangunan Zona Integritas Balmon Jakarta.

Efisiensi

Pemanfaatan teknologi digital untuk mendata tamu yang datang sehingga tidak memerlukan buku tamu yang diisi secara manual, dan pelaksanaan survei juga memanfaatkan platform digital yang sudah disediakan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital sehingga tidak memerlukan biaya.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlaq

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala-kendala selama kegiatan berlangsung.

Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

Harmonis

- Petugas pelayanan mengedepankan sikap saling menghargai, peduli, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat saat memberikan pelayanan.

Loyal

- Taat dan tertib dalam menjalankan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Adaptif

- Petugas pelayanan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi maupun regulasi baru dalam pengurusan perizinan spektrum frekuensi radio;
- Petugas pelayanan secara aktif mempelajari dan memanfaatkan sistem pelayanan berbasis digital yang digunakan dalam proses perizinan spektrum frekuensi radio, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien kepada masyarakat.

Kolaboratif

- Secara aktif berupaya membangun kerja sama yang baik dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Petugas pelayanan secara aktif berkoordinasi dengan unit kerja terkait, baik di lingkungan internal maupun dengan instansi lain, untuk memastikan proses pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku

Dokumentasi Kegiatan



IK-1.12 Persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IKM/IPKP)

Latar Belakang

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) atau Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, integritas aparatur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa proses pelayanan dilakukan secara profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen pengukuran yang dapat menggambarkan tingkat integritas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Survei Integritas Pelayanan Publik dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap potensi praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyimpangan lainnya dalam proses pelayanan publik. Hasil survei ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana penyelenggara pelayanan telah menerapkan prinsip integritas dalam setiap proses pelayanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya Survei Integritas Pelayanan Publik, diharapkan instansi penyelenggara layanan dapat memperkuat komitmen dalam menerapkan budaya integritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga tercipta pelayanan publik yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

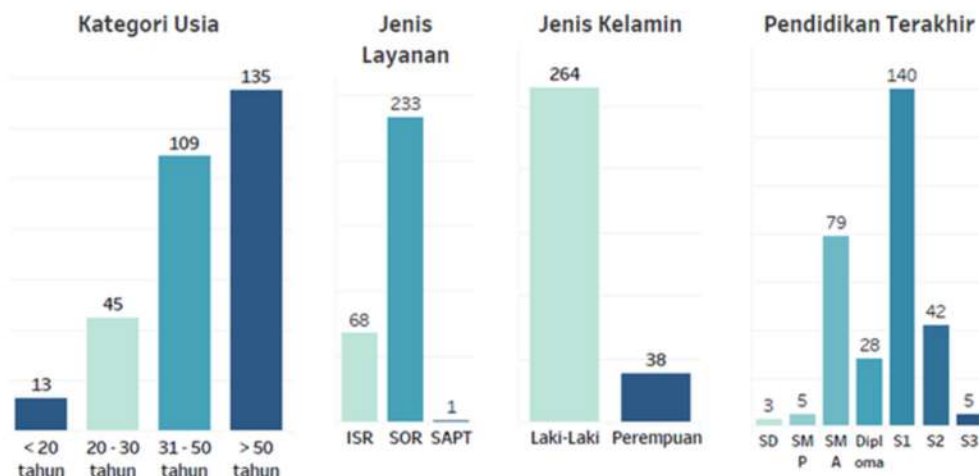
Capaian kinerja

Indeks Survei		Kategori	Indeks
IIPP	3.91	Diskriminasi Pelayanan	3.91
		Pelayanan Di Luar Prosedur	3.90
		Penerimaan Imbalan	3.92
IPAK	3.91	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.92
		Pungutan Liar (Pungli)	3.92

Berdasarkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik, nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) yang diperoleh adalah 3,91, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah dilaksanakan dengan tingkat integritas yang baik. Penilaian tersebut tercermin dari beberapa aspek yang diukur, antara lain diskriminasi pelayanan dengan nilai 3,91, pelayanan di luar prosedur sebesar 3,90, serta penerimaan imbalan yang memperoleh nilai 3,92. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) juga mencapai 3,91, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan publik yang diberikan telah bebas dari praktik korupsi dan pungutan tidak resmi. Hal ini tercermin dari penilaian terhadap unsur percaloan atau perantara tidak resmi serta pungutan liar (pungli) yang masing-masing memperoleh nilai 3,92. Secara keseluruhan, capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada prinsip integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Profil Responden Survei



Capaian 4 Tahun Terakhir

Tahun	IIPP/IPAK		Persentase
	Target	Capaian	
2022	3.60	3.65	100%
2023	3.60	3.82	100%
2024	3.60	3.85	100%
2025	3.60	3.91	100%

Berdasarkan capaian Survei Integritas Pelayanan Publik dalam periode empat tahun terakhir (2022–2025), nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK) secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Dengan target indeks sebesar 3,60, realisasi capaian menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 3,65 pada tahun 2022, 3,82 pada tahun 2023, 3,85 pada tahun 2024, dan 3,91 pada tahun 2025. Seluruh capaian tersebut menunjukkan persentase kinerja sebesar 100%, yang menandakan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai bahkan melampaui nilai target yang ditentukan.

Peningkatan nilai indeks tersebut mencerminkan semakin baiknya penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk upaya pencegahan terhadap praktik diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, percaloan, maupun pungutan liar. Capaian ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	IIPP/IPAK		Persentase
	Target	Capaian	
UPT Jakarta	3.60	3.92	100%
UPT Bandung	3.60	3.93	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik UPT Jakarta maupun UPT Bandung dapat mencapai target kinerjanya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kedua UPT tersebut dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terkait standar pelayanan yang diberikan sehingga mendapatkan penilaian Sangat Baik. Kedepannya masing-masing UPT perlu melanjutkan kinerja baiknya dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan dengan menerapkan inovasi-inovasi baru yang lebih berdampak dalam memberikan pelayanan.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Tercapainya nilai IIPP/IPAK yang baik ditindaklanjuti dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan budaya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat melakukan penguatan pengawasan internal terhadap proses pelayanan, memastikan seluruh layanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta terus mengingatkan petugas pelayanan untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme. Selain itu, instansi juga dapat meningkatkan transparansi layanan melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan, serta memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat sebagai sarana pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan dalam pelayanan.

Tercapainya nilai IIPP/IPAK memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan integritas pelayanan yang diberikan. Masyarakat merasa lebih yakin bahwa pelayanan yang diterima dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun percaloan. Selain itu, capaian tersebut juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional dan berintegritas di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara akuntabel serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Dalam upaya mencapai target Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK), berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan:

- Petugas pelayanan melakukan berbagai inovasi dan langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Meningkatkan transparansi layanan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai persyaratan, prosedur, biaya, serta jangka waktu pelayanan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Petugas pelayanan aktif memberikan penjelasan dan asistensi kepada masyarakat terkait proses pelayanan, sehingga pengguna layanan dapat memahami tahapan yang harus dilalui tanpa melalui perantara atau pihak ketiga yang tidak resmi.
- Petugas pelayanan memperkuat penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap proses pelayanan serta mengedepankan sikap profesional, jujur, dan berintegritas dalam melayani masyarakat

Efisiensi

Pemanfaatan teknologi digital untuk mendata tamu yang datang sehingga tidak memerlukan buku tamu yang diisi secara manual, dan pelaksanaan survei juga memanfaatkan platform digital yang sudah disediakan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital sehingga tidak memerlukan biaya.

Implementasi Nilai Budaya BerAKhlak

Implementasi Nilai Budaya BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala-kendala selama kegiatan berlangsung.

Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

Harmonis

- Petugas pelayanan mengedepankan sikap saling menghargai, peduli, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat saat memberikan pelayanan.

Loyal

- Taat dan tertib dalam menjalankan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Adaptif

- Petugas pelayanan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi maupun regulasi baru dalam pengelolaan perizinan spektrum frekuensi radio;
- Petugas pelayanan secara aktif mempelajari dan memanfaatkan sistem pelayanan berbasis digital yang digunakan dalam proses perizinan spektrum frekuensi radio, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien kepada masyarakat.

Kolaboratif

- Secara aktif berupaya membangun kerja sama yang baik dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Petugas pelayanan secara aktif berkoordinasi dengan unit kerja terkait, baik di lingkungan internal maupun dengan instansi lain, untuk memastikan proses pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku

Dokumentasi Kegiatan



IK-1.13 Persentase (%) tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (Prima Aksi)

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib, akurat, dan akuntabel, diperlukan validitas data perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) yang mutakhir dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Keakuratan data koordinat site ISR menjadi elemen krusial dalam mendukung pengawasan, pengendalian, serta optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, khususnya pada layanan Microwave Link. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan, Kementerian melalui program Prima Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) melaksanakan kegiatan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR yang telah berjalan sejak Tahun 2023 berbasis kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, baik secara on-site maupun on-desk, dengan mempertimbangkan dinamika perizinan ISR yang bersifat terus berkembang. Oleh karena itu, verifikasi data koordinat site ISR dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai rencana kerja dan ketersediaan sumber daya UPT, serta dapat disinergikan dengan kegiatan pengawasan dan monitoring lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dan monitoring bersama antara UPT dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital guna memastikan bahwa pemegang ISR menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital juga menyediakan mekanisme layanan fast-track untuk percepatan proses perizinan ISR atas hasil verifikasi data koordinat site. Tahapan kegiatan meliputi evaluasi data hasil verifikasi tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan, identifikasi ketidaksesuaian data koordinat site ISR, serta pemanfaatan data ISR terkini beserta penerapan MDRS (Master Data Reference Site) yang disediakan melalui sistem pelaporan daring. Selanjutnya, UPT melakukan analisis dan menetapkan target kinerja berdasarkan data site ISR yang masih belum sesuai. Target tersebut dapat disesuaikan apabila dalam pelaksanaan ditemukan ketidaksesuaian tambahan pada kegiatan verifikasi berikutnya. Pada tahap berikutnya, UPT melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil verifikasi bersama pemegang ISR setempat. Progres tindak lanjut dilaporkan secara triwulanan kepada Direktorat Layanan Infrastruktur Digital sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan perizinan ISR Microwave Link, termasuk efektivitas layanan fast-track.

Capaian kinerja

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menetapkan indikator kinerja berupa Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) dengan target capaian sebesar 100%. Hingga akhir Desember 2025, realisasi terhadap indikator kinerja tersebut berhasil mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2025, capaian tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi, monitoring, serta koordinasi dengan pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) telah berjalan secara efektif. Selain itu, implementasi sistem MDRS serta dukungan mekanisme fast-track dalam proses perizinan turut berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut terhadap site ISR yang teridentifikasi tidak sesuai. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan Prima Aksi pada tahun berjalan dapat dinyatakan berhasil memenuhi seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%

Pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) dilakukan terhadap site ISR yang sebelumnya teridentifikasi tidak sesuai berdasarkan hasil verifikasi lapangan maupun verifikasi administrasi. Kegiatan tindak lanjut dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemegang ISR untuk melakukan penyesuaian data koordinat maupun pembaruan data pada sistem MDRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pemegang ISR	Hasil Verifikasi Site ISR yang Tidak Sesuai	Site ISR yang Telah Ditindaklanjuti	Capaian
1	PT Indosat Tbk	4	4	100%
2	PT XLSmart Telecom Sejahtera	1	1	100%
TOTAL		5	5	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan tindak lanjut verifikasi ISR Microwave Link yang tidak sesuai pada Tahun 2025, UPT telah menetapkan target penyelesaian terhadap seluruh site ISR yang sebelumnya teridentifikasi tidak sesuai. Tindak lanjut dilaksanakan oleh pemegang ISR melalui proses pembaruan data koordinat, penyesuaian parameter teknis, serta pemutakhiran data pada sistem MDRS sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Adapun rincian tindak lanjut berdasarkan masing-masing pemegang ISR adalah sebagai berikut:

1) PT Indosat Tbk

Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 4 ISR yang tidak sesuai. Seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemegang ISR melalui proses penyesuaian dan pembaruan data koordinat sehingga keempat ISR tersebut telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dan capaian tindak lanjut verifikasi untuk PT Indosat Tbk mencapai 100%.

2) PT XLSmart Telecom Sejahtera

Pada PT XLSmart Telecom Sejahtera terdapat 1 ISR yang teridentifikasi tidak sesuai berdasarkan hasil verifikasi. Pemegang ISR telah melakukan tindak lanjut melalui pembaruan data koordinat serta penyesuaian data pada sistem MDRS. Dengan telah dilakukannya tindak lanjut tersebut, ISR dimaksud dinyatakan telah sesuai dan capaian tindak lanjut verifikasi mencapai 100%.

Secara keseluruhan, UPT telah berhasil menindaklanjuti seluruh site ISR yang teridentifikasi tidak sesuai dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses koordinasi, verifikasi, serta monitoring yang dilaksanakan berjalan secara efektif sehingga seluruh temuan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penerapan sistem MDRS serta dukungan mekanisme percepatan layanan (fast-track) dalam proses perizinan turut memberikan dampak positif dalam mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut oleh pemegang ISR. Dengan demikian, target kinerja kegiatan Prima Aksi Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal.

Faktor Kendala/Hambatan dalam Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain adanya ketidaksesuaian antara data koordinat yang tercantum dalam dokumen ISR dengan kondisi aktual di lapangan, perbedaan tingkat akurasi perangkat GPS yang digunakan saat pengukuran, serta respons dari pemegang ISR yang memerlukan waktu dalam melakukan penyesuaian data. Meskipun demikian, melalui upaya koordinasi dan pemantauan yang intensif, seluruh site ISR yang teridentifikasi tidak sesuai dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga capaian kegiatan tetap memenuhi target sebesar 100%. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan sistem MDRS sebagai referensi data koordinat, peningkatan koordinasi dengan pemegang ISR, pelaksanaan verifikasi baik secara on-site maupun on-desk, percepatan proses perubahan data melalui mekanisme layanan fast-track, serta pemanfaatan tools berbasis plus code untuk meningkatkan konsistensi dan akurasi data koordinat.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Pada akhir Tahun 2025, seluruh temuan hasil verifikasi site ISR telah ditindaklanjuti oleh pemegang ISR melalui modifikasi data koordinat pada sistem perizinan maupun penghentian ISR yang tidak sesuai, sehingga seluruh ketidaksesuaian dapat diselesaikan secara tuntas. Tindak lanjut ini berdampak pada meningkatnya akurasi dan validitas data perizinan, terciptanya tertib administrasi spektrum frekuensi radio, berkurangnya potensi penggunaan frekuensi yang tidak sesuai izin, serta mendukung optimalisasi PNBPH BHP frekuensi radio, sehingga memperkuat tata kelola spektrum yang lebih akuntabel dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai dalam Program Prima Aksi menunjukkan capaian kinerja yang optimal dengan realisasi target 100%. Keberhasilan ini didukung oleh inovasi dalam penguatan analisis berbasis data melalui pemanfaatan MDRS, integrasi data perizinan terkini, serta monitoring progres secara berkala dan terukur. Selain itu, penerapan mekanisme koordinasi intensif dengan pemegang ISR, pendekatan verifikasi secara on-site dan on-desk, serta dukungan fast-track menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian temuan ketidaksesuaian. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi dan validitas data perizinan, tetapi juga memperkuat tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Sebagai rekomendasi untuk tahun selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan integrasi data lintas sistem perizinan untuk meminimalkan duplikasi atau inkonsistensi data, serta peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis berkelanjutan. Selain itu, sinergi yang lebih erat antara UPT dan unit pusat perlu terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan memastikan validitas data ISR tetap terpelihara secara konsisten.

Efisiensi

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link dalam Program Prima Aksi menunjukkan aspek efisiensi yang optimal, karena kegiatan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan dan dilaksanakan dengan menyandingkannya pada kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio serta Penertiban Nasional SFR/APT. Integrasi pelaksanaan ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran perjalanan dinas secara bersamaan dalam satu rangkaian kegiatan lapangan, sehingga tidak diperlukan alokasi anggaran khusus. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan dan validasi data perizinan, tetapi juga mencerminkan prinsip efisiensi dan optimalisasi anggaran negara dalam mendukung tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib dan akuntabel.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlak

Pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site Izin ISR dalam Program Prima Aksi merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam tata kelola perizinan spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini mencerminkan orientasi pelayanan melalui upaya peningkatan akurasi dan kepastian hukum data ISR serta dukungan mekanisme fast-track, sekaligus menjunjung tinggi akuntabilitas melalui evaluasi data secara sistematis, pemanfaatan data ISR terkini dan MDRS yang disediakan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital, serta pelaporan progres secara triwulanan.

Pelaksanaan verifikasi secara on-site dan on-desk menunjukkan kompetensi teknis petugas, didukung koordinasi yang harmonis dan kolaboratif antara UPT dan Direktorat serta komunikasi konstruktif dengan pemegang ISR. Konsistensi pelaksanaan sejak tahun 2023 mencerminkan loyalitas terhadap kebijakan kementerian, sementara penyesuaian target kinerja berdasarkan dinamika perizinan menunjukkan sikap adaptif dalam mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

Dokumentasi Kegiatan



IK-2.1 Nilai kinerja anggaran Balai/Loka Tahun 2025

Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infradigi). Unit ini memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi DKI Jakarta (termasuk Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas tersebut, Balai Monitor didukung oleh Subbagian Umum yang menjalankan fungsi administrasi dan dukungan manajerial, meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta kebutuhan operasional dan rumah tangga kantor. Peran ini sangat penting dalam memastikan terselenggaranya layanan pengawasan spektrum secara optimal.

Pada Tahun 2025, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Balai Monitor menargetkan peningkatan mutu tata kelola birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien. Keberhasilan pencapaian target tersebut diukur melalui indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital dengan sasaran nilai sebesar 86.95. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas perencanaan anggaran, konsistensi pelaksanaan program, serta tingkat realisasi anggaran, yang didukung oleh proses monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dapat semakin berkualitas, transparan, serta mencerminkan prinsip akuntabilitas dan good governance.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Sasaran tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil (result-based management).

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran dimaksud adalah Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrstruktur Digital, dengan target sebesar 86,95. Indikator ini dipilih karena mampu merepresentasikan kualitas pengelolaan anggaran secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Penilaian terhadap Nilai Kinerja Anggaran dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu:

(NK Perencanaan DIPA Baru) + NK Pelaksanaan (Rata2 Baru+Lama)

Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (DIPA Baru), yang mencerminkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan anggaran, konsistensi antara perencanaan program dan penganggaran, serta ketepatan waktu dalam proses penetapan DIPA; dan

Nilai Kinerja Pelaksanaan, yang merupakan rata-rata kinerja pelaksanaan DIPA Baru dan DIPA Lama, yang menggambarkan efektivitas realisasi anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Capaian Targer

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Target nilai sebesar 86,95, sementara realisasi yang diperoleh adalah sebesar 84,37, atau terdapat selisih sebesar 2,58 poin di bawah target, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

(NK Perencanaan DIPA Baru) + NK Pelaksanaan (Rata2 Baru+Lama)

$$37.5 + (45.34+48.4)/2 = 37.5+46.87 = 84.37$$

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses restrukturisasi organisasi pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang berdampak pada mekanisme penilaian kinerja anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).

Dalam proses penilaian pada aplikasi www.monev.kemenkeu.go.id, DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tidak memperoleh nilai efisiensi maksimal sebesar 25% pada komponen Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam melakukan tagging SBKK/SBKU sebagai akibat dari penyesuaian struktur organisasi pascarestrukturisasi.

Sebagai penjelasan lebih lanjut, pelaksanaan SBKK pada Tahun 2025 oleh DJID masih tercatat (tagged) pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Ditjen SDPPI dengan kode unit kerja 059.03, sesuai dengan ketentuan PMK SBK Nomor 92 Tahun 2024.

Sementara itu, DJID merupakan entitas hasil restrukturisasi dari Ditjen SDPPI yang melanjutkan pelaksanaan kegiatan berbasis SBK yang sebelumnya telah dijalankan oleh unit tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melalui Surat Sekretaris Jenderal Komdigi Nomor B-2786/SJ.3/KU.01.16/09/2025 bulan September 2025 perihal Permohonan Penyesuaian Nilai pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital TA 2025, Tim DSP DJA menyampaikan bahwa revisi atau penerbitan PMK SBK tidak dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama (2025). Akibatnya, SBK yang sebelumnya ditetapkan atas nama Ditjen SDPPI tidak dapat diakui sebagai SBKK atas nama DJID (kode unit kerja 059.09) pada tahun berjalan.

Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pengakuan nilai efisiensi dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran DJID Tahun 2025, sehingga capaian indikator belum dapat optimal meskipun secara substantif pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dan dilanjutkan oleh unit hasil restrukturisasi.

Berikut dilampirkan hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama 5 tahun terakhir :

Kinerja	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta Tahun 2025	91.16	91.57	89.30	90.97	84.37

Dinamika capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif. Meskipun secara umum realisasi tetap berada di atas target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2025, variasi kenaikan dan penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Dinamika Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan pengelolaan anggaran yang terjadi dari tahun ke tahun turut memengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran. Penyesuaian tersebut dapat berupa pergeseran prioritas program, realokasi pagu anggaran, perubahan regulasi teknis, maupun penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini berimplikasi pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang memerlukan adaptasi cepat dari satuan kerja.

Meskipun demikian, dampak perubahan kebijakan tersebut masih dapat dikelola dalam batas kinerja yang baik, sehingga capaian secara umum tetap berada pada level yang melampaui target.

2) Fluktuasi Realisasi Program dan Kegiatan

Variasi capaian Nilai Kinerja Anggaran juga dipengaruhi oleh dinamika dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa kegiatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi atau ketergantungan pada pihak ketiga berpotensi menghadapi kendala operasional, seperti penyesuaian jadwal pelaksanaan, perubahan penyedia barang/jasa, maupun hambatan teknis lainnya.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada ketepatan waktu realisasi anggaran dan memengaruhi komponen penilaian kinerja. Namun demikian, melalui penerapan langkah mitigasi yang tepat, penguatan koordinasi, serta percepatan tindak lanjut atas kendala yang muncul, capaian kinerja secara keseluruhan tetap dapat dipertahankan di atas target yang telah ditetapkan.

3) Aktivitas Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas capaian Nilai Kinerja Anggaran. Melalui mekanisme pemantauan berkala, satuan kerja dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi hambatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Proses evaluasi yang dilakukan secara periodik memungkinkan pengambilan langkah korektif secara cepat dan tepat, sehingga dampak kendala dapat diminimalkan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, efektivitas pengendalian internal mampu menjaga capaian kinerja tetap berada pada tingkat yang optimal.

4) Penyesuaian Prioritas Anggaran

Penyesuaian prioritas anggaran, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak atau strategis, turut memengaruhi variasi capaian Nilai Kinerja Anggaran antar tahun. Realokasi pagu dan perubahan fokus kegiatan dapat berdampak pada pola perencanaan maupun tingkat realisasi anggaran pada periode tertentu.

Meskipun demikian, melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan pelaksanaan kegiatan yang efektif, satuan kerja tetap mampu menjaga kualitas capaian kinerja. Optimalisasi sumber daya dan penguatan pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam memastikan hasil tetap berada pada kategori baik meskipun terjadi pergeseran prioritas.

Kesimpulan

Meskipun capaian Nilai Kinerja Anggaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif, realisasi yang secara konsisten melampaui target mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang tetap terjaga dengan baik. Variasi capaian tersebut lebih disebabkan oleh faktor kebijakan dan operasional yang bersifat dinamis, bukan oleh penurunan kualitas tata kelola.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu mengelola sumber daya secara efektif, beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan prioritas anggaran, serta menerapkan langkah mitigasi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengendalian internal, perencanaan, dan monitoring yang diterapkan telah berjalan secara memadai dalam mendukung tata kelola birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

inovasi, Keberhasilan/ketidaktercapaian

Ketidaktercapaian dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta disebabkan oleh Perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Transformasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perluasan mandat kementerian, dari fokus pada komunikasi dan informatika menjadi penguatan agenda transformasi digital nasional. Struktur organisasi Komdigi Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan nomenklatur ini menandai orientasi baru yang menitikberatkan pada percepatan digitalisasi birokrasi, ekonomi, dan masyarakat, serta transformasi layanan publik secara menyeluruh.

Dalam implementasinya, perubahan tersebut menimbulkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk penyesuaian dokumen perencanaan, sistem aplikasi keuangan, serta mekanisme pengukuran kinerja. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah turut berdampak pada pergeseran alokasi dalam DIPA Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang. Kondisi ini sempat menimbulkan ketidakpastian terhadap target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) serta menyebabkan terjadinya konsentrasi realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.

Sebagai langkah mitigasi dan upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja, telah dilakukan beberapa tindakan strategis, antara lain:

a. Penyesuaian Dokumen Perencanaan

Melakukan revisi dokumen anggaran agar selaras dengan nomenklatur kementerian yang baru, serta memastikan konsistensi indikator kinerja meskipun terjadi perubahan struktur organisasi.

b. Sinkronisasi Sistem Penganggaran

Melakukan pembaruan kode satuan kerja, program, dan kegiatan pada aplikasi pengelolaan keuangan seperti SAKTI dan OM-SPAN guna mencegah ketidaksesuaian data (mismatch) dalam proses pelaporan dan evaluasi.

c. Sosialisasi Internal dan Reprioritisasi Belanja

Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait perubahan nomenklatur dan implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran. Selain itu, dilakukan penyesuaian belanja dengan memangkas kegiatan administratif atau seremonial dan mengalihkan anggaran ke program prioritas yang berdampak langsung pada kinerja.

d. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Mengoptimalkan pemantauan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur utama, disertai evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan efisiensi tidak menurunkan kualitas layanan publik. Pemanfaatan dashboard dan aplikasi kinerja digital juga diperkuat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

e. Kolaborasi dan Benchmarking

Melakukan koordinasi dan studi banding dengan UPT lain sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan anggaran. Dari sisi pelayanan, diterapkan praktik terbaik (best practices) seperti digitalisasi layanan, integrasi sistem, serta penyederhanaan proses birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas capaian kinerja di tengah dinamika restrukturisasi dan kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada transformasi digital.

Tindak Lanjut dan Dampak yang Dihasilkan

Sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja berkelanjutan, hasil evaluasi pada laporan kinerja tahun sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dalam pengelolaan indikator Nilai Kinerja Anggaran. Berbagai langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Berbasis Data

Perencanaan kegiatan dan anggaran disusun dengan mempertimbangkan analisis data historis, hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan yang lebih terukur. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan alokasi anggaran yang realistis dan meminimalkan potensi deviasi signifikan pada akhir tahun anggaran.

2. Optimalisasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko dalam pengelolaan anggaran dilakukan sejak awal tahun, termasuk potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala administratif, maupun perubahan kebijakan. Strategi mitigasi disiapkan secara dini untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan target kinerja dapat tercapai.

3. Penjadwalan Kegiatan yang Lebih Proporsional

Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan secara merata sepanjang tahun anggaran guna menghindari penumpukan realisasi belanja pada triwulan akhir. Penjadwalan yang tertata mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia secara lebih efektif.

4. Monitoring dan Evaluasi Secara Proaktif dan Berkala

Frekuensi evaluasi internal ditingkatkan, minimal pada setiap akhir triwulan, untuk memantau capaian realisasi anggaran, mengidentifikasi potensi deviasi, serta menyiapkan langkah korektif secara lebih dini. Pendekatan ini mendukung pengendalian kinerja yang lebih responsif dan akuntabel.

Melalui implementasi langkah-langkah tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan transparan, serta menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang optimal dari tahun ke tahun.

Implementasi Nilai Budaya BerAkhlak

Pelayanan/ Akuntabel/ Kompeten/ Harmonis/ Loyal/ Adaptif/ Kolaboratif)

Dalam rangka mendukung pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta secara konsisten menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan.

Berorientasi Pelayanan

- Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta berkomitmen memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Setiap program dan kegiatan diarahkan agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendukung efektivitas penggunaan anggaran negara.

Akuntabel

- Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dengan dukungan dokumen yang lengkap guna menjamin transparansi. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kesesuaian realisasi anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompeten

- Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi di bidang keuangan, administrasi, serta teknologi informasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi.

Harmonis

- Lingkungan kerja yang kondusif dibangun melalui komunikasi terbuka, diskusi rutin, dan penguatan kerja tim. Pendekatan ini mendorong terciptanya hubungan kerja yang saling menghargai dan mendukung, sehingga setiap pegawai dapat berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan tugas.

Loyal

- Nilai loyalitas ditanamkan melalui penguatan komitmen terhadap visi, misi, serta tujuan organisasi. Setiap pegawai diarahkan untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan berorientasi pada kemajuan institusi.

Adaptif

- Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, baik dalam kebijakan penganggaran, sistem aplikasi keuangan, maupun perkembangan teknologi. Inovasi dan penyempurnaan proses kerja terus dilakukan agar pengelolaan anggaran tetap relevan, efisien, dan responsif terhadap tantangan.

Kolaboratif

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan semangat kerja sama yang kuat, baik secara internal maupun dengan pihak eksternal seperti KPPN, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya. Kolaborasi yang efektif memastikan integrasi pelaksanaan kegiatan, meminimalkan kendala operasional, serta mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Efisiensi

Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pada Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, Layanan Publik, serta Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian output dan capaian indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengelolaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Jakarta dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 secara umum dapat dinilai cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara ekonomis dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pendekatan efisiensi tersebut tidak hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas capaian kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran diarahkan untuk memberikan hasil yang optimal, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta terus berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola organisasi, sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Dampak

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, yang antara lain dipengaruhi oleh kendala teknis dan faktor administratif. Namun demikian, secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan, baik pada aspek operasional maupun strategis.

Efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dilakukan tetap mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Dengan kata lain, meskipun terdapat deviasi secara angka terhadap target, kualitas pemanfaatan anggaran dan capaian output kegiatan tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan stabilitas jaringan komunikasi di wilayah kerja.

Secara lebih rinci, dampak yang dihasilkan meliputi:

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio

Pengelolaan anggaran yang tetap terjaga kualitasnya memungkinkan dukungan operasional pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio tetap terlaksana sesuai rencana.

Wilayah kerja yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Kepulauan Seribu tetap memperoleh layanan pengawasan secara memadai.

Potensi gangguan spektrum frekuensi yang dapat mengganggu layanan komunikasi publik tetap dapat diminimalkan melalui optimalisasi peralatan monitoring dan respons operasional yang terkoordinasi.

Dengan demikian, meskipun target Nilai Kinerja Anggaran belum sepenuhnya tercapai secara kuantitatif akibat faktor teknis, dampak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap positif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan efektivitas program tetap terjaga serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Penguatan Mutu dan Responsivitas Layanan Publik

Pemanfaatan anggaran yang tetap efektif memungkinkan layanan pengajuan izin frekuensi, pengawasan lapangan, serta penanganan gangguan spektrum dilaksanakan secara lebih cepat dan responsif.

Hal ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi yang sangat bergantung pada stabilitas jaringan komunikasi dalam mendukung aktivitas operasional dan pelayanan publik sehari-hari.

3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Strategis

Pengelolaan anggaran yang terarah memastikan program-program strategis, seperti pemantauan spektrum frekuensi, penertiban perangkat ilegal, serta kegiatan sosialisasi penggunaan frekuensi radio, dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan prioritas.

Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap regulasi spektrum frekuensi, sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku semakin meningkat.

4. Penguatan Dukungan Sarana dan Prasarana Operasional

Pengelolaan anggaran yang optimal mendukung penyediaan dan pemeliharaan peralatan monitoring frekuensi yang lebih modern dan andal, sehingga kualitas pengawasan semakin meningkat.

Selain itu, ketersediaan sarana operasional seperti kendaraan dinas, perangkat komunikasi, serta fasilitas kerja yang memadai turut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja yang luas dan memiliki karakteristik beragam.

5. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Tata kelola anggaran yang tertib dan terencana dengan baik mendukung terjalannya koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak eksternal.

Kolaborasi dengan instansi terkait seperti KPPN, operator telekomunikasi, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya dapat berjalan lebih lancar karena didukung oleh perencanaan dan realisasi anggaran yang jelas serta akuntabel.

6. Akselerasi Transformasi dan Inovasi Layanan Digital

Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran turut mendorong pengembangan sistem layanan berbasis digital, seperti pelayanan daring, pelaporan elektronik, serta pemantauan berbasis aplikasi.

Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, praktis, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sejalan dengan arah transformasi digital sektor komunikasi dan pengawasan spektrum frekuensi.

Benchmarking UPT

Pada indikator kinerja ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Jakarta melakukan kegiatan benchmarking dengan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang. Benchmarking dilakukan karena capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas I Tangerang tercatat lebih tinggi dibandingkan Balmon SFR Kelas I Jakarta.

Meskipun demikian, perlu disampaikan bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas I Tangerang pada tahun berjalan juga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, secara komparatif nilai yang diperoleh Balmon SFR Kelas I Tangerang masih berada di atas capaian Balmon SFR Kelas I Jakarta, sehingga praktik pengelolaan anggaran yang diterapkan menjadi referensi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Lebih lanjut, pada Tahun 2025 secara umum seluruh UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tidak terdapat yang mampu mencapai target Nilai Kinerja Anggaran sesuai target Perjanjian Kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor eksternal dan kebijakan yang bersifat sistemik yang memengaruhi capaian indikator tersebut, bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja satuan kerja tertentu.

Dengan demikian, kegiatan benchmarking yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan anggaran yang lebih efektif, memperkuat proses perencanaan dan pelaksanaan, serta meningkatkan kualitas pengendalian internal, guna mendorong perbaikan capaian kinerja pada periode berikutnya.

Berikut capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang :

Nama UPT	Capaian
Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta	84.37
Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang	84.41

Perbedaan capaian Nilai Kinerja Anggaran tersebut dimungkinkan terjadi karena Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang relatif lebih optimal dalam mengelola anggaran dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil (output oriented). Beberapa praktik pengelolaan yang teridentifikasi antara lain:

- Perencanaan yang lebih matang dan terukur, sehingga target output kegiatan dapat dicapai secara lebih konsisten sesuai dengan rencana awal.
- Minimnya revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), yang menunjukkan stabilitas perencanaan program serta ketepatan dalam penetapan kebutuhan anggaran sejak awal tahun.
- Efektivitas pencapaian output, yang mencerminkan penerapan prinsip value for money, yaitu pengelolaan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam menghasilkan kinerja yang terukur.

Praktik-praktik tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam rangka memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.

Dengan mengadopsi langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026 dapat meningkat secara lebih optimal, baik dari sisi kualitas perencanaan, stabilitas pelaksanaan, maupun efektivitas pencapaian output, sehingga kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

IK-2.2 Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)**Latar Belakang**

Nilai kualitas pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan penting karena menjadi syarat karakteristik pelaporan keuangan yang dapat dipercaya oleh penggunanya. Nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA diukur melalui tingkat akurasi data, kelengkapan CaLK, dan tindak lanjut TDK (Telaah Data Keuangan) pada aplikasi SAKTI. Pada 2025, nilai ini menunjukkan tren peningkatan, krusial untuk mempertahankan opini WTP, meskipun masih berpotensi terjadi kesalahan manusia jika proses tidak terintegrasi.

Pemerintah diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Menurut standar akuntansi, laporan keuangan harus memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Faktor penentu kualitas pelaporan keuangan Adalah Kompetensi SDM, sistem akuntansi yang memadai, serta kedisiplinan pencatatan transaksi menjadi faktor utama.

Maksud dari indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai seberapa akurat, lengkap, tepat waktu, dan patuh terhadap standar akuntansi, laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja (Satker) selaku UAKPA dan sebagai indikator mutu laporan keuangan satker, Nilai kualitas digunakan untuk menilai apakah laporan UAKPA sudah sesuai standar. Pelaporan keuangan juga dimaksudkan sebagai Alat monitoring yang menjadi sarana pengawasan internal Ditjen Perbendaharaan terhadap kepatuhan satker dalam menyusun laporan. Nilai ini menjadi salah satu ukuran kinerja satker dalam pengelolaan anggaran.

Tujuan dari indikator ini Adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat satuan kerja, sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu juga untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan agar dapat dijadikan dasar pengambilan Keputusan dalam pengelolaan anggaran negara, memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi Kementerian Keuangan, Mendukung opini audit BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga, mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian data melalui rekonsiliasi rutin antara UAKPA dan KPPN.

Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang ditargetkan tahun 2025 adalah sebesar 97%.

Capaian kinerja

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mencapai target sesuai yang di targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 100% dengan memenuhi dokumen-dokumen yang menjadi data dukung untuk memenuhi unsur-unsur penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kemenkomdigi.

Berikut tabel capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun Anggaran 2025.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas TataKelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100

Capaian target PK tersebut diperoleh dari nilai perhitungan manual Perjanjian Kinerja pelaporan Keuangan yang disampaikan oleh Biro Keuangan dan SDM Kementerian Komdigi.

Analisis capaian yang berkesinambungan

Sebagai bahan analisis capaian yang berkesinambungan untuk tahun sebelumnya, tahun berjalan dan rencana tahun depan dan sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini/tahun berjalan. Berikut dilampirkan hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama 5 tahun terakhir :

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Kualitas TataKelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	2025	97	100	Diatas Target
		2024	100	100	Sesuai Target
		2023	100	100	Sesuai Target
		2022	100	98	Dibawah Target
		2021	-	-	-

Pada tahun 2021 indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) belum tersedia, indikator ini baru menjadi target kinerja di tahun

2022. Indikator kualitas pelaporan keuangan UAKPA menekankan pada ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, kepatuhan terhadap SAP, rekonsiliasi, dan tindak lanjut audit. Capaian kinerja Pada tahun 2022 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tidak mencapai target yang telah ditetapkan 100, hanya mendapat nilai capaian 98,di karenakan ada pengurangan nilai dari koreksi audit 2,5 berupa kesalahan Akun Belanja. Untuk capaian kinerja tahun 2003-2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah memenuhi target yaitu 100, begitu pula dengan tahun 2025 dari target 97 telah tercapai 100.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak lepas dari peran penting pengelola keuangan yang kompeten di bidangnya, kordinasi dan arahan pimpinan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Untuk itu kami Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berkomitmen untuk terus menciptakan budaya kerja yang baik dengan menerapkan prinsip2 pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal yang diterapkan untuk capaian kinerja tahun selanjutnya adalah dengan :

- Meningkatkan konsistensi ketepatan waktu, akurasi data.
- Memperhatikan Nilai IKPA, nilai IKPA yang masih sedikit di bawah target, menandakan perlunya penguatan koordinasi pelaksanaan anggaran.
- Patuh terhadap regulasi Kualitas pelaporan keuangan Rekomendasi Tindak Lanjut
- Melakukan Monitoring triwulanan untuk menjaga konsistensi capaian.
- Pelatihan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan.
- Optimalisasi aplikasi keuangan (SAKTI/OMSPAN) agar input data lebih cepat dan minim error.
- Penguatan koordinasi antar unit agar realisasi anggaran lebih sesuai target.

Analisa yang terkait indikator kinerja secara umum dan holistic

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) merupakan dimensi Kepatuhan Regulasi yang wajib disusun sesuai PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) menjadi indikator utama kualitas pelaporan. Rekonsiliasi eksternal dan internal yang harus dilakukan sesuai jadwal, memastikan konsistensi data antar bagian; Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA bukan hanya soal nilai skor, tetapi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan akuntabel. Analisa holistik menunjukkan bahwa keberhasilan indikator ini bergantung pada sinergi antara proses, sistem, SDM, dan budaya akuntabilitas.

Benchmarking

Berdasarkan hasil benchmarking Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), seluruh UPT memperoleh nilai maksimal sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan antar UPT telah seragam dan berada pada tingkat yang sangat baik. Keseragaman capaian tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, ketepatan waktu penyampaian laporan, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Sebagai rekomendasi, capaian ini perlu dipertahankan melalui konsistensi penerapan standar pelaporan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, UPT diharapkan dapat menjadikan capaian kualitas pelaporan keuangan ini sebagai fondasi untuk mendorong peningkatan kinerja anggaran dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

•Benchmarking Balmon SFR Kelas I Jakarta dengan Balmon SFR Kelas I Surabaya.

Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Atas Laporan Keuangan Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Benchmark antara Satker Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan Satker Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja	Metode Penilaian											
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang			Balmon Jakarta				Balmon Surabaya		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x (2)	(5) = (4) x 100	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%											
	1) Tidak ada transaksi koreksi audit		0%	0%	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 1 s.d 5		-5%	-5%	-2,5	-10							
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d 10		-10%	-10%	-5								
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d 15		-15%	-15%	-7,5								
	5) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d 20		-20%	-20%	-10								
	6) Jumlah transaksi koreksi audit lebih 20		-50%	-50%	-25								
2	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal/Barang	20%											
	1) Tidak ada kesalahan penggunaan akun		0%	0%	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	2) Kesalahan akun Rp 1jt - Rp 500jt		-5%	-5%	-1								
	3) Kesalahan akun Rp 500jt - Rp 250jt		-10%	-10%	-2								
	4) Kesalahan akun Rp 250jt - Rp 500jt		-15%	-15%	-3								
	5) Kesalahan akun Rp 500jt - Rp 1Milyar		-20%	-20%	-4								
	6) Kesalahan akun di atas Rp 1Milyar		-50%	-50%	-10								
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%											
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-100%	-10								
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%											
	1) Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-100%	-5								
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%											
	1) Efektif		0%	0%	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	2) Efektif dengan pengecualian		-30%	-30%	-3								
	3) Mengandung Kelemahan Material		-70%	-70%	-7								
6	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Hasil Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke entitas pelaporan	5%											
	1) Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-100%	-5								
Nilai Akhir						98	100	100	-	100	100	100	-

•Benchmarking Balmon SFR Kelas I Jakarta dengan Balmon SFR Kelas I Surabaya.

Benchmark Hasil nilai kualitas pelaporan keuangan antara Satker Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan Satker Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya terdapat penilaian yang berbeda dikarenakan pada tahun 2022 Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta terdapat kesalahan akun belanja sehingga mempengaruhi nilai kualitas pelaporan keuangan, pada point tersebut indicator penilaian laporan keuangan terdapat jumlah transaksi koreksi audit senilai -2,5 sehingga nilai akhir hanya mencapai 98 yang seharusnya 100. Berbeda dengan Satker Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tidak terdapat nilai pengurang pada indicator penilaian laporan keuangan sehingga nilai akhir 100.

Faktor kendala/hambatan pada pencapaian target

Faktor Kendala/Hambatan Utama dalam mencapai target nilai pelaporan diantaranya Perencanaan Anggaran yang tidak realistis atau kurang detail menyebabkan deviasi antara rencana dan realisasi. Perubahan kebijakan pemerintah (misalnya efisiensi belanja APBN) menuntut penyesuaian cepat yang sering tidak diantisipasi. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa. Realisasi belanja tidak sesuai jadwal, sehingga memengaruhi indikator ketepatan waktu. Adanya revisi DIPA yang berulang, menimbulkan ketidakstabilan pelaksanaan. Kesalahan pencatatan transaksi keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke KPPN. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru mengenai pelaporan. Sumber Daya Manusia (SDM) Kompetensi aparatur UAKPA yang belum merata, terutama dalam penggunaan aplikasi keuangan. Rotasi pegawai yang tinggi menyebabkan hilangnya kontinuitas pengetahuan. Minimnya pelatihan teknis terkait IKPA dan pelaporan keuangan. Lemahnya koordinasi antara UAKPA dengan KPPN maupun unit eselon di atasnya. Kurangnya komunikasi lintas bagian (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) sehingga data tidak sinkron. Gangguan pada aplikasi keuangan (misalnya SAKTI). Keterbatasan infrastruktur IT di daerah, menyebabkan keterlambatan input data. Integrasi sistem antar unit belum optimal.

Tindak lanjut dan Dampak yang dihasilkan

Mengidentifikasi indikator yang nilainya rendah pada laporan kinerja sebelumnya. Menentukan akar masalah (misalnya keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, atau rendahnya kualitas perencanaan). Perbaikan Proses Perencanaan Menyusun rencana kerja yang lebih realistis dan terukur berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Mengintegrasikan rekomendasi hasil evaluasi ke dalam RKA/DIPA agar lebih sesuai dengan kebutuhan unit. Penguatan SDM dan Kapasitas Melaksanakan pelatihan teknis terkait aplikasi pelaporan (misalnya SAKTI, OMSPAN). Memberikan pendampingan khusus bagi unit yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan. Peningkatan Koordinasi Memperbaiki komunikasi antar bagian (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) agar data lebih sinkron. Menjalin koordinasi intensif dengan KPPN untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan. Monitoring dan Evaluasi Berkala Membuat sistem monitoring internal yang lebih ketat, misalnya dashboard capaian indikator.

Melakukan evaluasi triwulanan agar perbaikan bisa segera dilakukan sebelum akhir tahun. Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan penggunaan aplikasi keuangan agar input data lebih cepat dan akurat. Memanfaatkan hasil audit sistem sebelumnya untuk memperbaiki kelemahan teknis.

Dampak Positif dari Pemanfaatan Laporan Kinerja Kualitas pelaporan meningkat → nilai IKPA lebih baik. Efisiensi anggaran → perencanaan lebih tepat sasaran. Akuntabilitas terjaga → meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan. Pembelajaran berkelanjutan → laporan kinerja tidak hanya jadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat perbaikan.

Pada tahun 2025 capaian target PK ini baru diberlakukan yaitu Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk itu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta akan terus meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Pada target kinerja ini tidak ada pagu anggaran yang tersedia, berikut table kinerja untuk PK dimaksud :

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09

Rekomendasi

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) juga merupakan bagian dari pentingnya pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Satker. Dengan pemenuhan aspek-aspek utama yang menjadi faktor tercapainya target kinerja ini maka semakin tinggi pula kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Adapun beberapa rekomendasi perbaikan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) harus memperhatikan aspek-aspek diantaranya antara lain :

- Efisiensi Proses yang berfokus pada ketepatan waktu yang berdampak pada kemampuan organisasi dalam mengelola data dan sistem secara efektif;
- Efektivitas Informasi yang berfokus pada akurasi kelengkapan kepatuhan SAP yang berdampak pada penjaminan laporan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan yang valid;
- Akuntabilitas & Transparansi yang berfokus pada Tindak lanjut audit, integritas dan berdampak Meningkatkan kepercayaan publik dan opini audit yang lebih baik

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA bukan hanya soal angka penilaian, tetapi mencerminkan kesehatan tata kelola keuangan Organisasi. Analisa holistik menunjukkan bahwa kualitas laporan dipengaruhi oleh proses, sistem, SDM, dan budaya akuntabilitas.

Efisiensi

Efisiensi dalam indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA berarti menghasilkan laporan yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan sesuai regulasi dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dengan efisiensi yang baik, UAKPA tidak hanya meningkatkan nilai kualitas laporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

BAB IV

PENUTUP